



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Lamongrejo Nomor 92 Lamongan Kode Pos (62217)
Telepon (0322) 321706 E-mail : bakesbangpol@lamongankab.go.id
Website : www.lamongankab.go.id/bakesbangpol/

Lamongan, 31 Maret 2026

Nomor : 050/ 55 /413.206/2026
Sifat : **Penting**
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko
Tahun 2026 Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Lamongan


Yth. Bpk. Bupati Lamongan
di -

LAMONGAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana dalam peraturan pemerintah tersebut mengamanatkan seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam pelaksanaan peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern, setiap Perangkat Daerah perlu melakukan pengelolaan risiko dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan dengan hormat laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Tahun 2026 dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan, sebagaimana terlampir.

Demikian laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2026 untuk menjadikan periksa.

PI. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN LAMONGAN



JOKO NURSYANTO, S.H., M.H.
Perdana Tingkat I
NIP. 19680114 198801 1 001

Tembusan:

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Lamongan
2. Unit Kepatuhan Risiko
Pemerintah Daerah
Kabupaten Lamongan



KABUPATEN LAMONGAN

LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO

BAKESBANGPOL

2026

JL. Lamongrejo 92 Lamongan

(0322) 321706, 317611

Email : bakesbang@lamongankab.go.id

Website : www.lamongankab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa kita panjatkan atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Penilaian Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen Penilaian Risiko ini disusun sebagai implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta dalam rangka mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif dan berkelanjutan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan. Penilaian risiko merupakan bagian penting dalam proses manajemen risiko yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

Seiring dengan dinamika perkembangan lingkungan strategis, baik pada tingkat lokal, regional, maupun nasional, diperlukan adanya upaya yang sistematis dan terstruktur dalam mengantisipasi berbagai risiko yang mungkin timbul. Oleh karena itu, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi kinerja organisasi secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyusunan Dokumen Penilaian Risiko ini. Partisipasi dan dukungan tersebut sangat berarti dalam mewujudkan kualitas dokumen yang komprehensif dan aplikatif. Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saran dan masukan yang konstruktif sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Demikian Dokumen Penilaian Risiko Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2026 ini disusun, dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai pedoman dalam meningkatkan kinerja organisasi serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.


PEMERINTAH KABUPATEN
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN LAMONGAN
DOKO NURSIYANTO, S.H., M.H.
Pembaca Tingkat I
NIP. 19680114 198801 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Maksud Dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup	3
BAB II PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN	4
A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini.....	4
B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian.....	11
BAB III PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	14
A. Penetapan Konteks/Tujuan	14
B. Hasil Analisis Risiko.....	30
C. Pengendalian Yang Sudah Dilakukan.....	41
D. Pengendalian Yang Masih Dibutuhkan	45
BAB IV RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	55
BAB V RANCANGAN PEMANTAUAN	63
BAB VI PENUTUP	69

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Hasil Kuesioner Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern CEE.....	5
Tabel 2. 2 Simpulan Berdasarkan Dokumen	7
Tabel 2. 3 Simpulan Hasil Survei Persepsi terhadap Lingkungan Pengendalian	9
Tabel 2. 4 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan	11
Tabel 2. 5 Kertas Kerja Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Lamongan.....	15
Tabel 2. 6 Kertas Kerja Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.....	17
Tabel 2. 7 Daftar Risiko Strategis Prioritas Tahun 2026	31
Tabel 2. 8 Daftar Risiko Operasional Prioritas Tahun 2025.....	32
Tabel 2. 9 Skala Kemungkinan dan Dampak.....	41
Tabel 2. 10 Pengendalian yang Sudah Dilakukan	41
Tabel 2. 11 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan	46
Tabel 2. 12 Pengkomunikasian Pengendalian yang Dibangun	56
Tabel 2. 13 Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel merupakan tuntutan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat ketahanan ideologi, membina organisasi kemasyarakatan, serta memelihara kondusivitas kehidupan sosial masyarakat. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, organisasi dihadapkan pada berbagai tantangan dan ketidakpastian yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan sistematis melalui manajemen risiko guna mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan potensi risiko yang mungkin timbul dalam setiap proses kegiatan.

Perkembangan lingkungan strategis, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global, memberikan pengaruh signifikan terhadap kompleksitas risiko yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Dinamika sosial politik masyarakat, perubahan kebijakan dan regulasi, perkembangan teknologi informasi, serta meningkatnya ekspektasi publik terhadap pelayanan pemerintah menjadi faktor-faktor yang memicu munculnya berbagai risiko baru. Selain itu, faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta sistem dan prosedur kerja juga dapat menjadi sumber risiko yang perlu dikelola secara cermat. Tanpa adanya pengelolaan risiko yang terstruktur dan berkelanjutan, berbagai potensi gangguan tersebut dapat berdampak pada menurunnya kualitas kinerja organisasi.

Penerapan manajemen risiko dalam instansi pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian Risiko pada Instansi Pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Manajemen risiko bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan yang andal, pengamanan aset negara, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum. Dalam konteks ini,

penyusunan dokumen penilaian manajemen risiko menjadi langkah awal yang krusial untuk memetakan risiko secara komprehensif, menentukan tingkat kemungkinan dan dampaknya, serta menetapkan strategi mitigasi yang tepat dan terukur.

Melalui penyusunan dokumen penilaian manajemen risiko ini, diharapkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian program dan kegiatan. Dokumen ini juga diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam proses bisnis organisasi secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, peningkatan kesadaran dan budaya sadar risiko (*risk awareness*) di lingkungan organisasi menjadi kunci dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan sejak dini. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko yang efektif diharapkan mampu mendukung peningkatan kinerja organisasi, memperkuat stabilitas daerah, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan Kabupaten Lamongan secara keseluruhan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pengawas Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dokumen penilaian manajemen risiko dimaksudkan sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dalam mengelola risiko secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi acuan dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi berbagai

potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, dokumen ini juga dimaksudkan untuk mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan, sehingga seluruh unit kerja memiliki pemahaman dan langkah yang selaras dalam menghadapi ketidakpastian.

Adapun tujuan penyusunan dokumen penilaian manajemen risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi dan memetakan potensi risiko, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal organisasi.
2. Menyusun langkah-langkah mitigasi risiko yang tepat, efektif, dan terukur untuk meminimalkan dampak negatif serta meningkatkan peluang keberhasilan pencapaian tujuan.
3. Meningkatkan kualitas pengambilan keputusan melalui penyediaan informasi risiko yang akurat dan komprehensif.
4. Mendukung penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal.
5. Meningkatkan kinerja organisasi serta menjamin terselenggaranya program dan kegiatan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

D. RUANG LINGKUP

Kegiatan penilaian Resiko tahun 2026 di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dilakukan untuk mengetahui skala dampak dan intensitas terjadinya resiko yang sudah disusun terhadap pencapaian tugas dan tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.

BAB II

PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku pelaksana urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik di Kabupaten Lamongan telah Menyusun register Resiko OPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai tujuan Mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan berwawasan kebangsaan serta sadar politik di Kabupaten Lamongan, Adapun resiko yang telah berhasil dikategorikan menjadi 2 yaitu resiko strategis dan operasional. kondisi lingkungan pengendalian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan pada tahun 2026 berdasarkan pada dokumen hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern dapat dikategorikan memiliki nilai “memadai” sebagaimana tabel di bawah ini :

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dalam pengelolaan mitigasi Resiko memiliki kondisi lingkungan pengendalian yang memadai namun masih terdapat kelemahan berdasarkan simpulan dokumen penilaian pengendalian intern sebagaimana berikut :

Tabel 2. 2 Simpulan Berdasarkan Dokumen

No	Sumber Data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
1	Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Nilai Dasar, Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, Pakta Integritas dan Komitmen Anti Korupsi	Pemahaman aparatur terhadap nilai dasar dan kode etik telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan penguatan sosialisasi dan internalisasi secara berkala agar penerapannya semakin konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA
2	Aplikasi SiMEGILAN (Sistem Informasi dan Manajemen Kepegawaian Lamongan)	Sebagian aparatur telah mengikuti pengembangan kompetensi, namun masih terdapat peluang untuk meningkatkan pemerataan pelatihan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan jabatan dan perkembangan tugas organisasi.	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI
3	Laporan Hasil Reviu Akuntabilitas Kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Semester I Tahun Anggaran 2025 Nomor: 700.1.2.1/131.6/LHP /413.201/2025 tanggal 20 Agustus 2025	Pola kepemimpinan yang mendukung koordinasi sudah berjalan, namun masih terdapat ruang untuk memperkuat komunikasi internal dan keterlibatan seluruh pegawai dalam proses pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja.	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF
4	Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan.	Struktur organisasi telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, namun penyesuaian pembagian tugas dan fungsi masih dapat terus disempurnakan agar lebih responsif terhadap dinamika program dan kegiatan.	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

No	Sumber Data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
5	Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan Nomor : 188/ 1 /KEP/413.206/2026 Tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Lamongan TA 2026	Pendelegasian kewenang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, namun masih diperlukan penguatan dokumentasi dan kejelasan alur koordinasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif dan terukur.	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
6	E-Performance, SKP, dan Peta Jabatan Bagor	Tidak melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA
7	Laporan Hasil Audit Ketaatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor: 700.1.2.1/105/LHP/4 13.201/2025 Tanggal 15 Juli 2025	Koordinasi dengan aparat pengawasan telah dilaksanakan, namun tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan masih dapat lebih dioptimalkan untuk memperkuat sistem pengendalian internal.	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF
8	Laporan SKM Bakesbangpol Tahun 2025	Hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait telah terjalin, namun masih terdapat peluang untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi agar pelaksanaan program lintas sektor dapat berjalan lebih efektif.	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT

Adapun perbandingan simpulan dokumen dan persepsi pegawai dalam penilaian lingkungan pengendalian intern sebagaimana berikut:

Tabel 2. 3 Simpulan Hasil Survei Persepsi terhadap Lingkungan Pengendalian

	Sub Unsur	Hasil Review Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	Memadai	Pemahaman aparatur terhadap nilai dasar dan kode etik telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan penguatan sosialisasi dan internalisasi secara berkala agar penerapannya semakin konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.	Memadai	Penerapan integritas dan nilai etika di lingkungan kerja telah berjalan dengan baik dan dipahami oleh mayoritas pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.	Memadai	<p>- Pemahaman aparatur terhadap nilai dasar dan kode etik telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan penguatan sosialisasi dan internalisasi secara berkala agar penerapannya semakin konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.</p> <p>- Penerapan integritas dan nilai etika di lingkungan kerja telah berjalan dengan baik dan dipahami oleh mayoritas pegawai dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.</p>
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	Memadai	Sebagian aparatur telah mengikuti pengembangan kompetensi, namun masih terdapat peluang untuk meningkatkan pemerataan pelatihan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan jabatan dan perkembangan tugas organisasi.	Memadai	Pegawai memiliki komitmen yang baik dalam meningkatkan kompetensi serta mendukung pengembangan kapasitas sesuai dengan kebutuhan organisasi	Memadai	<p>- Sebagian aparatur telah mengikuti pengembangan kompetensi, namun masih terdapat peluang untuk meningkatkan pemerataan pelatihan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan jabatan dan perkembangan tugas organisasi.</p> <p>- Pegawai memiliki komitmen yang baik dalam meningkatkan kompetensi serta mendukung pengembangan kapasitas sesuai dengan kebutuhan organisasi</p>
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	Memadai	Pola kepemimpinan yang mendukung koordinasi sudah berjalan, namun masih terdapat ruang untuk memperkuat komunikasi internal dan keterlibatan seluruh pegawai dalam proses pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja.	Memadai	Mayoritas pegawai merasa bahwa pimpinan telah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta memberikan arahan dan dukungan yang cukup dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja	Memadai	<p>- Pola kepemimpinan yang mendukung koordinasi sudah berjalan, namun masih terdapat ruang untuk memperkuat komunikasi internal dan keterlibatan seluruh pegawai dalam proses pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja.</p> <p>- Mayoritas pegawai merasa bahwa pimpinan telah menciptakan lingkungan kerja yang kondusif serta memberikan arahan dan dukungan yang cukup dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja</p>
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	Memadai	Struktur organisasi telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, namun penyesuaian pembagian tugas dan fungsi masih dapat terus disempurnakan agar lebih responsif terhadap dinamika program dan kegiatan.	Memadai	Struktur organisasi yang ada dinilai telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan	Memadai	<p>- Struktur organisasi telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, namun penyesuaian pembagian tugas dan fungsi masih dapat terus disempurnakan agar lebih responsif terhadap dinamika program dan kegiatan.</p> <p>- Struktur organisasi yang ada dinilai telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta</p>

	Sub Unsur	Hasil Review Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
							mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Memadai	Pendelegasian kewenang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, namun masih diperlukan penguatan dokumentasi dan kejelasan alur koordinasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif dan terukur.	Memadai	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah berjalan dengan baik sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di masing-masing unit kerja	Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Pendelegasian kewenang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, namun masih diperlukan penguatan dokumentasi dan kejelasan alur koordinasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif dan terukur. - Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab telah berjalan dengan baik sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas di masing-masing unit kerja
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	Memadai	Tidak melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala	Memadai	Kebijakan terkait pembinaan sumber daya manusia telah diterapkan dengan baik dan mendukung pengembangan kinerja aparatur	Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala - Kebijakan terkait pembinaan sumber daya manusia telah diterapkan dengan baik dan mendukung pengembangan kinerja aparatur
7	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF	Memadai	Koordinasi dengan aparat pengawasan telah dilaksanakan, namun tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan masih dapat lebih dioptimalkan untuk memperkuat sistem pengendalian internal.	Memadai	Peran pengawasan internal dinilai telah berjalan dengan baik dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel	Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan aparat pengawasan telah dilaksanakan, namun tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan masih dapat lebih dioptimalkan untuk memperkuat sistem pengendalian internal. - Peran pengawasan internal dinilai telah berjalan dengan baik dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	Memadai	Hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait telah terjalin, namun masih terdapat peluang untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi agar pelaksanaan program lintas sektor dapat berjalan lebih efektif.	Memadai	Hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait telah terjalin dengan baik dan mendukung pelaksanaan program serta kegiatan organisasi	Memadai	<ul style="list-style-type: none"> - Hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait telah terjalin, namun masih terdapat peluang untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi agar pelaksanaan program lintas sektor dapat berjalan lebih efektif. - Hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait telah terjalin dengan baik dan mendukung pelaksanaan program serta kegiatan organisasi

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Berdasarkan kondisi lingkungan pengendalian saat ini, masih terdapat celah kelemahan lingkungan pengendalian. Guna meningkatkan lingkungan pengendalian yang lebih baik maka diperlukan beberapa strategi rencana tindak pengendalian perbaikan terhadap lingkungan pengendalian untuk meminimalisir kelemahan yang masih ada sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
1	Pemahaman aparaturnya terhadap nilai dasar dan kode etik telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan penguatan sosialisasi dan internalisasi secara berkala agar penerapannya semakin konsisten dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.	Melaksanakan sosialisasi dan penguatan internalisasi nilai dasar, kode etik, dan pakta integritas secara berkala melalui rapat internal, pembinaan pegawai, serta media informasi internal.	Kepala Badan	Desember 2026
2	Sebagian aparaturnya telah mengikuti pengembangan kompetensi, namun masih terdapat peluang untuk meningkatkan pemerataan pelatihan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan kebutuhan jabatan dan perkembangan tugas organisasi.	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai secara bertahap serta mendorong partisipasi aparaturnya dalam pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan jabatan.	Sekretaris Badan melalui Subbag Umum & Kepegawaian	Desember 2026

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
3	Pola kepemimpinan yang mendukung koordinasi sudah berjalan, namun masih terdapat ruang untuk memperkuat komunikasi internal dan keterlibatan seluruh pegawai dalam proses pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja.	Meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal melalui rapat rutin, forum diskusi pegawai, serta pelibatan pegawai dalam evaluasi kinerja dan penyelesaian permasalahan organisasi.	Kepala Badan	Desember 2026
4	Struktur organisasi telah mengacu pada ketentuan yang berlaku, namun penyesuaian pembagian tugas dan fungsi masih dapat terus disempurnakan agar lebih responsif terhadap dinamika program dan kegiatan.	Melakukan evaluasi terhadap pembagian tugas dan fungsi unit kerja secara berkala agar lebih efektif serta menyesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan.	Sekretaris Badan	Desember 2026
5	Pendelegasian kewenang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan, namun masih diperlukan penguatan dokumentasi dan kejelasan alur koordinasi agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lebih efektif dan terukur.	Memperkuat dokumentasi pendelegasian kewenangan serta memperjelas alur koordinasi melalui penyusunan atau pembaruan SOP dan penetapan tugas secara tertulis.	Sekretaris Badan	Desember 2026
6	Tidak melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala	Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan kebijakan pembinaan SDM guna memastikan pengembangan pegawai berjalan sesuai rencana.	Kepala Badan	Desember 2026

No	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
7	Koordinasi dengan aparat pengawasan telah dilaksanakan, namun tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil pengawasan masih dapat lebih dioptimalkan untuk memperkuat sistem pengendalian internal.	Menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara sistematis serta meningkatkan koordinasi dengan aparat pengawasan untuk memperkuat sistem pengendalian internal.	Kepala Badan	Desember 2026
8	Hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi terkait telah terjalin, namun masih terdapat peluang untuk meningkatkan intensitas komunikasi dan kolaborasi agar pelaksanaan program lintas sektor dapat berjalan lebih efektif.	Meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan instansi pemerintah terkait melalui rapat koordinasi, forum kerja sama, serta kegiatan lintas sektor guna mendukung pelaksanaan program.	Kepala Badan	Desember 2026

BAB III

PENILAIAN RISIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS/TUJUAN

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah memperhatikan dan mengacu pada casecading Misi IV RPJMD di atas. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “Meningkatnya Toleransi Masyarakat” dengan indikator Nilai Toleransi. Sehingga tujuan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan adalah “Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM”.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi PD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Agar bisa mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik, dan terukur dalam waktu tahunan maka sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Harmonisasi Sosial Dan Wawasan Kebangsaan
2. Meningkatkan Kualitas Politik Dan Demokrasi
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik

A. HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

Berdasarkan pada hasil analisis penyusunan register resiko, maka dapat dijabarkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik di Kabupaten Lamongan memiliki resiko yang berhasil dianalisis yang terbagi kedalam resiko startegis dan resiko operasional sebagaimana matriks yang disajikan pada tabel 2.5 dan 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Kertas Kerja Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Lamongan

No	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Persentase konflik ipoleksosbud, hukum dan HAM yang diselesaikan	Risiko Operasional: Terjadi konflik berulang memperdalam polarisasi antar kelompok	Terjadi konflik sosial berulang antar individu atau kelompok	RSO.26.05.206.01	Kepala Bakesbangpol	1. Masalah mendasar belum teratasi sepenuhnya 2. Salah satu pihak merasa dirugikan oleh hasil mediasi atau merasa dipaksa untuk setuju 3. Masih ada ketidak hadiran ruang komunikasi yang efektif	Internal dan Eksternal	UC	Konflik menjadi besar dan menimbulkan keresahan masyarakat karena terganggunya keamanan dan ketertiban	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
2	Persentase peningkatan pemahaman pendidikan politik masyarakat	Risiko Operasional: Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan tema kegiatan	Narasumber menyampaikan materi tidak sesuai dengan tema kegiatan	RSO.26.05.206.02	Kepala Bakesbangpol	Permintaan materi kurang spesifik	Internal	C	Pemahaman peserta terkait pendidikan politik tidak mengalami peningkatan	Masyarakat
3	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Mengikuti Pemilihan Presiden Dan Pemilihan DPD/DPR/DPRD	Risiko Oprasional: Rendahnya partisipasi kelompok rentan (difabel, lansia)	Masyarakat kelompok rentan tidak menghadiri pemilihan (Golput)	RSO.26.05.206.03	Kepala Bakesbangpol	Akses informasi dan fasilitas terbatas	Internal	C	Ketimpangan partisipasi	Masyarakat dan Pemerintah
4	Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam mengikuti Pemilihan Gubernur	Risiko Operasional: Rendahnya partisipasi pemilih pemula	Masyarakat pemula tidak menghadiri pemilihan (Golput)	RSO.26.05.206.04	Kepala Bakesbangpol	Rendahnya ketertarikan masyarakat pemula dalam partisipasi politik	Eksternal	C	Potensi kehilangan pemilih masa depan	Masyarakat dan Perangkat Daerah
5	Persentase partisipasi masyarakat dalam mengikuti Pemilihan Bupati	Risiko Operasional: Rendahnya partisipasi pemilih secara umum	Masyarakat tidak menghadiri pemilihan (Golput)	RSO.26.05.206.05	Kepala Bakesbangpol	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu	Eksternal	C	Target partisipasi pemilih tidak tercapai	Pemerintah Daerah dan Perangkat daerah

No	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab		C/UC	Dampak	
		Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
6	IKM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Risiko Operasional: Jumlah responden tidak tercapai	Masyarakat yang pernah menggunakan pelayanan Bakesbangpol tidak mengisi SKM	RSO.26.05.206.06	Kepala Bakesbangpol	Masyarakat tidak mengetahui adanya survey kepuasan masyarakat terhadap layanan	Eksternal	C	Kevalidan hasil SKM diragukan	Perangkat daerah
7	Nilai SAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Risiko Operasional: Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	Pegawai belum secara optimal melakukan perbaiki rekemendasi LHE SAKIP	RSO.26.05.206.07	Kepala Bakesbangpol	Pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	Internal	C	Kurang efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi	Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah
8	Nilai Manajemen Resiko	Risiko Kemitraan: Pelaporan penyusunan manajemen resiko pada sistem informasi pelaporan yang disediakan mitra OPD tidak optimal	Mitra OPD pengampu manajemen resiko kurang optimal dalam penerapan sistem informasi secara stabil dan terintegrasi	RSO.26.05.206.08	Kepala Bakesbangpol	Kurang optimalnya sistem informasi pelaporan manajemen resiko yang stabil dan terintegrasi (data hilang)	Eksternal	C	Proses pelaporan manajemen resiko Perangkat Daerah tidak efektif dan efisien	Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah
9	Nilai Manajemen Resiko	Risiko Operasional: Penerapan manajemen resiko masih belum optimal	Pegawai belum sepenuhnya memahami penerapan manajemen resiko di internal Perangkat Daerah	RSO.26.05.206.09	Kepala Bakesbangpol	Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya manajemen resiko organisasi	Internal	C	Efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan terhambat	Perangkat Daerah, ASN dan Masyarakat

Tabel 2. 6 Kertas Kerja Operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Evaluasi	Risiko Operasional: Jumlah laporan tidak sesuai target	Pegawai yang ditugaskan tidak menyelesaikan laporan tepat waktu	ROO.26.05.206.01	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kurangnya kompetensi pegawai	Internal	C	Perumusan kebijakan teknis menjadi kurang maksimal	Pemkab Lamongan dan Bakesbangpol
2	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan	Risiko Operasional: Perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan	Terdapat perubahan lokasi pelaksanaan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila, yang biasanya digelar di Alun-Alun dipindah ke tempat lain	ROO.26.05.206.02	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Alun-Alun digunakan untuk kegiatan lain	Eksternal	C	Persiapan pelaksanaan upacara menjadi terganggu	Pemkab Lamongan dan Bakesbangpol
3	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perencanaan	Risiko Operasional: Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	Terdapat perubahan jadwal pelaksanaan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila	ROO.26.05.206.03	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Adanya Instruksi BPI yang secara mendadak mengubah jadwal pelaksanaan upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila	Eksternal	C	Persiapan pelaksanaan upacara menjadi terganggu	Masyarakat, Pemkab Lamongan, dan Bakesbangpol
4	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Keterbatasan kemampuan mitra	Kesibukan pribadi pengurus DPPI (Duta Pancasila Paskibraka Indonesia)	ROO.26.05.206.04	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan	Kepengurusan DPPI hanya berjumlah 7 orang dan masing-masing memiliki kesibukan tersendiri	Eksternal	C	Tidak ada yang mampu mengikuti latihan dan bertugas	Paskibraka dan Bakesbangpol

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	Kebangsaan	Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			dalam mempersiapkan Paskibraka yang bertugas dalam Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila		Agama					
5	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perencanaan	Risiko Operasional: Kurangnya minat peserta yang mendaftar untuk mengikuti sosialisasi	Kehadiran peserta sosialisasi kurang dari target	ROO.26.05.206.05	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Peserta yang mendaftar kurang dari target yang telah ditentukan	Internal	C	Sosialisasi terlihat sepi; Indikator kinerja terkait jumlah orang yang mengikuti kegiatan menjadi tidak tercapai	Bakesbangpol
6	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Rumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Evaluasi	Risiko Fraud: Terdapat peserta paskibraka yang tidak sesuai dengan kriteria	Panitia seleksi meloloskan peserta meskipun tidak sesuai dengan standar kriteria	ROO.26.05.206.06	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Terdapat panitia seleksi yang meloloskan calon anggota paskibraka yang tidak sesuai kriteria atas dasar kepentingan pribadi	Internal	C	Timbulnya kesenjangan sosial dan menurunnya kredibilitas dalam seleksi paskibraka	Masyarakat dan Bakesbangpol
7	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kelompok Budaya yang Aktif	Evaluasi	Risiko Operasional: Jumlah laporan tidak sesuai target	Pegawai yang ditugaskan tidak menyelesaikan laporan tepat waktu	ROO.26.05.206.07	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kurangnya kompetensi pegawai	Internal	C	Perumusan kebijakan teknis menjadi kurang maksimal	Pemkab Lamongan dan Bakesbangpol

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
8	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kelompok Budaya yang Aktif	Pelaksanaan	Risiko Operasional: Narasumber yang diminta tidak bisa hadir	Narasumber tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh orang lain	ROO.26.05.206.08	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Adanya alasan tertentu atau force majeure sehingga narasumber tidak bisa hadir	Internal	C	Materi yang disampaikan terkadang tidak sesuai	Peserta dan Bakesbangpol
9	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kelompok Budaya yang Aktif	Perencanaan	Risiko Fraud: Spesifikasi alkes tidak sesuai dengan perjanjian	Spesifikasi alkes untuk kegiatan P4GN tidak sesuai dengan perjanjian	ROO.26.05.206.09	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Wording yang ambigu menyebabkan interpretasi berbeda dengan penyedia	Internal	C	Alkes yang datang tidak sesuai spesifikasi	Bakesbangpol
10	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kelompok Budaya yang Aktif	Pelaksanaan	Risiko Operasional: Belum terinventarisir secara menyeluruh keberadaan aliran kepercayaan	Aliran Kepercayaan /penghayat tidak melaporkan kegiatannya	ROO.26.05.206.10	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kurang optimalnya sosialisasi terhadap PB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri	Internal	C	Data Penghayat kepercayaan tidak terdeteksi sehingga timbulnya kegiatan penghayat kepercayaan yang meresahkan masyarakat karena tidak ada pengawasan	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
11	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Kelompok Budaya yang Aktif	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Kurang maksimalnya kinerja mitra	MLKI sebagai organisasi payung penghayat kepercayaan tidak memiliki data lengkap	ROO.26.05.206.11	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kurangnya koordinasi antara Bakesbangpol dengan MLKI	Internal	C	Bakesbangpol tidak memiliki data penghayat kepercayaan yang pasti	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
12	Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Jumlah Segmen Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan	Evaluasi	Risiko Oprasional: Jumlah peserta tidak memenuhi target	Jumlah peserta sosialisasi dibawah dari target yang ditetapkan	ROO.26.05.206.12	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam renstra	Internal	C	Target keluaran tidak tercapai	Bakesbangpol

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
	Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Parpol, Pemilu/Pemilu Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Politik											
13	Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Parpol, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Segmen Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Evaluasi	Resiko Kemitraan: Ditemukan Ketidaksesuaian prosentase alokasi kegiatan bersumber dana hibah parpol	Parpol menggunakan dana hibah untuk operasional lebih dari 40% tidak sesuai dengan ketentuan	ROO.26.05.206.13	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kurang pemahamannya aturan penggunaan alokasi dana hibah	Eksternal	C	Kerugian negara	Pemerintah Daerah	
14	Perumusan Kebijakan Teknis & Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan & Parpol, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Segmen Masyarakat yang Mendapatkan Pendidikan Politik	Evaluasi	Resiko Fraud : Laporan Hasil Monitoring dibuat tanpa turun ke lapangan (mark up kunjungan)	Petugas monitoring membuat Laporan hasil monitoring tetap dibuat lengkap dengan foto dokumentasi yang diambil dari kegiatan sebelumnya atau diminta dari panitia tanpa turun ke lapangan	ROO.26.05.206.14	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Tidak adanya mekanisme verifikasi lapangan	Internal	C	Kegagalan Program	Pemerintah Daerah	

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
15	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan	Pelaksanaan	Resiko Kemitraan: Terdapat Ormas yang melakukan tindakan tidak sesuai ataupun melenceng dengan tupoksinya	Resiko Kemitraan: Terdapat Ormas yang melakukan tindakan tidak sesuai ataupun melenceng dengan tupoksinya	ROO.26.05.206.15	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kurang fahamnya Ormas terhadap Tupoksinya sebagai mitra pemerintah dalam menunjang pembangunan	Eksternal	C	Merusak tatanan sosial dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
16	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan	Pelaksanaan	Resiko Operasional : Keterlambatan/lamanya penerbitan surat tanggapan keberadaan ormas	Verifikator Keormasan terlambat menerbitkan surat tanggapan keberadaan ormas	ROO.26.05.206.16	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Ormas tidak dapat memenuhi berkas persyaratan	Eksternal	C	Ormas tidak terdaftar	Ormas yang bersangkutan
17	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan	Perencanaan	Resiko Fraud : Intervensi bahan kebijakan oleh pihak eksternal	Ormas mendesak OPD untuk membuat Bahan Kebijakan di dominasi kepentingan ormas tertentu	ROO.26.05.206.17	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Ormas Bergerak dibidang yang rentan terhadap kepentingan politik	Eksternal	C	Citra Pemerintah Daerah menjadi negatif	Masyarakat dan Pemerintah Daerah
18	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan	Pelaksanaan	Resiko Fraud: Pemberian imbalan atau hadiah/gratifikasi agar didahulukan/dipermudah dalam proses pelayanan atau pengurusan hibah ormas	Ormas memberikan suap agar didahulukan mendapatkan hibah	ROO.26.05.206.18	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kebiasaan masyarakat untuk memberikan hadiah sebagai ucapan terimakasih	Eksternal	C	Ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen pelayanan publik	Bakesbangpol dan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
19	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik yang Ditindaklanjuti	Evaluasi	Risiko Oprasional: Kebijakan teknis yang dirumuskan tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan sehingga kurang efektif dalam pencegahan dan penanganan konflik	Tim perumus kebijakan menggunakan data lama atau data yang tidak diverifikasi ketika menyusun kebijakan teknis, sehingga kualitas rumusan kebijakan tidak mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya	ROO.26.05.206.19	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	1. Mekanisme pengumpulan data wilayah tidak konsisten. 2. Laporan situasi sosial terlambat diterima. 3. Tidak ada verifikasi silang yang memadai antarinstansi. 4. Sistem pelaporan masih manual sehingga rawan ketidakakuratan	Internal	C	1. Kebijakan teknis tidak tepat sasaran. 2. Antisipasi kerawanan sosial melemah. 3. Potensi konflik tidak tertangani secara optimal 4. Pemerintah daerah kehilangan ketepatan bukti dalam pengambilan keputusan.	Pemerintah daerah, aparat dan masyarakat di wilayah rawan
20	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik yang Ditindaklanjuti	Perencanaan	Resiko Kemitraan : Bahan Penyusunan kebijakan tidak lengkap atau tidak valid sehingga mengurangi kualitas analisis kewaspadaan	Instansi mitra tidak mengirim data, keterlambatan dalam mengirim data, atau memberikan informasi tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.05.206.20	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	Tidak ada aturan wajib lapor, data dari instansi eksternal tidak seragam, lemahnya follow up permintaan data	Internal dan Eksternal	C	Analisis kewaspadaan menjadi dangkal, potensi kerawanan tidak teridentifikasi, kebijakan kehilangan dasar empiris	Pemerintah daerah, aparat dan masyarakat
21	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik yang Ditindaklanjuti	Pelaksanaan	Resiko Kemitraan : koordinasi lintas sektor tidak efektif sehingga informasi kewaspadaan dan analisis menjadi tidak akurat	Instansi tidak hadir rapat, hadir tanpa data, atau tidak memberi masukan substantif	ROO.26.05.206.21	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	Tidak ada kewajiban hadir, jadwal koordinasi tidak diprioritaskan instansi, tidak ada sistem tindak lanjut rapat	Eksternal	C	Potensi kerawanan tidak terbaca, informasi simpang siur	Pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat
22	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan	Persentase Konflik yang Ditindaklanjuti	Pelaksanaan	Risiko Oprasional: Terlambatnya infomasi monitoring wilayah	Tim monitoring perangkat daerah tidak melaporkan secara tepat	ROO.26.05.206.22	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	Kurangnya jumlah SDM yang berkompeten	Internal	C	Kesulitan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat dalam mendeteksii	Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	Nasional dan Penanganan Konflik Sosial				waktu informasi wilayah yang dipantau						konflik	
23	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik yang Ditindaklanjuti	Evaluasi	Risiko Fraud : manipulasi data pelaporan hasil monitoring	Petugas monitoring atau operator pengolah data mengubah, menghilangkan, atau menambah informasi pada laporan monitoring sebelum disampaikan ke pimpinan, sehingga data tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan	ROO.26.05.206.23	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya mekanisme verifikasi silang antara laporan petugas dan laporan instansi vertikal. 2. Kurangnya pengawasan terhadap operator penginput data. 3. Sistem pelaporan masih manual sehingga rawan dimodifikasi. 4. Keterbatasan SDM sehingga kualitas pengawasan tidak konsisten 	Internal	C	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi kewaspadaan menjadi tidak akurat dan menyesatkan. 2. Pemerintah daerah sulit mengambil keputusan berbasis bukti. 3. Potensi konflik tidak terdeteksi, berpotensi meningkat karena fakta lapangan tidak dilaporkan. 4. Hilangnya integritas data dan kepercayaan antarinstansi 	Pemerintah Daerah, jajaran Forkopimda, instansi keamanan, masyarakat di wilayah berisiko.
24	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik yang Ditindaklanjuti	Evaluasi	Risiko Oprasional: dokumen hasil rapat forkopimda tidak menggambarkan kondisi nyata sehingga keputusan pimpinan daerah kurang tepat	Bahan rapat tidak lengkap, laporan instansi vertikal terlambat, analisis situasi tidak diperbarui	ROO.26.05.206.24	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	Format laporan tidak seragam, tidak ada verifikasi bahan sebelum rapat	Internal dan Eksternal	C	Rekomendasi forkopimda tidak akurat, arah kebijakan bisa salah, respon terhadap ancaman lokal melemah	Pemda, TNI, Polri, Kejaksaan dan masyarakat
25	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	Evaluasi	Risiko Oprasional: Pelaporan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada sistem informasi pelaporan tidak optimal	OPD Induk belum melakukan perencanaan dan evaluasi secara terintegrasi	ROO.26.05.206.25	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Kurang optimalnya sistem informasi pelaporan dan pemantauan kinerja Perangkat Daerah yang tidak terintegrasi	Eksternal	C	Proses pelaporan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tidak efektif dan efisien	Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Lamongan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab			C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
26	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	Pelaksanaan	Risiko Oprasional: Keterlambatan pengumpulan bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan dari bidang-bidang	Kepala Bidang dalam mengumpulkan bahan dan data yang tidak lengkap	ROO.26.05.206.26	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Kurangnya disiplin waktu dan tidak adanya timeline yang jelas atau perubahan jadwal secara mendadak	Eksternal	C	Proses penyusunan dokumen perencanaan terlambat selesai	Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Lamongan
27	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	Pelaksanaan	Resiko Fraud : Mark Up data realisasi kinerja	Bidang menaikkan capaian kinerja tidak sesuai dengan realisasi kinerja	ROO.26.05.206.27	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Kekhawatiran berkurangnya tunjangan performa kinerja (TPP)	Internal	C	Hasil SAKIP kurang dapat dipertanggungjawabkan	Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Lamongan
28	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Yang Disusun Tepat Waktu	Perencanaan	Resiko kemitraan : ketidaksinkronan permintaan data klasifikasi dari pihak ketiga (BPS) dengan data di OPD	BPS memberikan klasifikasi yang berbeda dengan yang dimiliki OPD	ROO.26.05.206.28	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Belum pernah adanya sosialisasi klasifikasi data dari pihak ketiga	Eksternal	C	Data bias tidak bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan	Perangkat Daerah dan Masyarakat Kabupaten Lamongan
29	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Pelaksanaan	Risiko Oprasional: Penyerapan anggaran tidak tepat waktu dan kurang maksimal	Antar instansi terjadi miss komunikasi terkait penyusunan rencana anggaran dan kegiatan	ROO.26.05.206.29	Kasubbag Keuangan	Kurangnya koordinasi dan komitmen antar instansi dalam penyusunan rencana anggaran dan kegiatan	Eksternal	C	Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran menjadi terhambat dan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan	1. Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Lamongan 2. Instansi terkait
30	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Keterlambatan pengiriman Rekom dari OPD Induk untuk pencairan TPP	Seluruh pegawai terlambat menerima TPP	ROO.26.05.206.30	Kasubbag Keuangan	Keterlambatan pengiriman rekom dari BPKD	Eksternal	C	Pegawai tidak menerima TPP tepat waktu	PNS Pemerintah Daerah
31	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Evaluasi	Risiko Fraud: Mencatat belanja yang tidak dilakukan agar anggarannya "terpakai"	PPTK merekayasa SPJ	ROO.26.05.206.31	Kasubbag Keuangan	Target kinerja SKPD dikaitkan dengan tingkat penyerapan anggaran.	Internal	C	Belanja barang habis pakai yang tidak pernah diterima SKPD sehingga laporan	Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
											akhir tahun dapat tepat waktu penyelesaiannya	
32	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Yang Disusun Tepat Waktu	Evaluasi	Risiko Oprasional: laporan pertanggungjawaban atau dokumen pendukung tidak tepat waktu	Bidang tidak mengirimkan SPJ lengkap secara tepat waktu	ROO.26.05.206.32	Kasubbag Keuangan	Tidak ada mekanisme kontrol penyampaian dokumen (jadwal, daftar cek, atau verifikasi kelengkapan)	Internal	C	Laporan bulanan/triwulan/semester terlambat dikompilasi	Perangkat Daerah
33	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian Yang Disusun Secara Berkualitas	Evaluasi	Risiko Oprasional: Rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai	Pegawai melanggar kedisiplinan dan menunda pekerjaan	ROO.26.05.206.33	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tidak adanya penerapan sanksi dan reward sehingga pegawai mengabaikan kedisiplinan	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan hingga menurunnya efektivitas kinerja organisasi	Perangkat Daerah dan masing-masing ASN
34	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian Yang Disusun Secara Berkualitas	Perencanaan	Risiko Fraud: Pengadaan pakaian dinas yang tidak sesuai spesifikasi	PPTK mengadakan pengadaan pakaian dinas tidak sesuai spesifikasi	ROO.26.05.206.34	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil	Internal	C	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya tidak sesuai standar	Perangkat Daerah dan masing-masing ASN
35	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Kepegawaian Yang Disusun Secara Berkualitas	Evaluasi	Risiko Kemitraan: Mitra tidak mampu memenuhi kebutuhan teknis unit kerja	BKPSDM sebagai mitra belum optimal mengetahui kebutuhan kompetensi tiap unit kerja	ROO.26.05.206.35	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1. Materi diklat dari mitra mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan teknis tiao unit kerja 2. Ketergantungan tinggi pada pihak ketiga (perguruan tinggi atau lembaga diklat lain) yang dapat menghambat fleksibilitas organisasi dalam meningkatkan kemampuan pegawai secara mandiri	Eksternal	C	Terjadi ketidaksesuaian kompetensi pegawai dengan tugas dan fungsi jabatan	Perangkat Daerah dan ASN dilingkup Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
36	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu	Pelaksanaan	Risiko Operasional: Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	Kasubbag Umum dan Kepegawaian belum melakukan layanan administrasi umum secara optimal	ROO.26.05.206.36	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kebutuhan layanan administrasi belum sepenuhnya terakomodir	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang menjadi kurang maksimal	Perangkat Daerah dan masing-masing ASN
37	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu	Perencanaan	Risiko Operasional: Kualitas komponen yang tidak standar (berisiko menimbulkan bahaya)	PPTK memasang komponen tidak sesuai standar	ROO.26.05.206.37	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil	Internal	C	Pelayanan masyarakat terganggu	Perangkat Daerah, masing-masing ASN dan pekerja
38	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu	Pelaksanaan	Risiko Operasional: Proses pengadaan yang lama	PPTK lama dalam menyediakan kebutuhan rumah tangga	ROO.26.05.206.38	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1. Kesalahan dalam merencanakan kas budget 2. Kerusakan peralatan secara bersamaan sehingga membutuhkan proses lebih untuk memisahkan mana yang urgent	Internal	C	Pelayanan internal menjadi tidak efektif	Perangkat Daerah, masing-masing ASN dan pekerja
39	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu	Evaluasi	Risiko Fraud: Pembuatan permintaan pembelian atau SPJ fiktif barang yang tidak pernah diterima atau digunakan oleh kantor	PPTK embuatan permintaan pembelian atau SPJ fiktif	ROO.26.05.206.39	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil	Internal	C	Kerugian negara	Perangkat Daerah, masing-masing ASN dan pekerja
40	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu	Pelaksanaan	Risiko Fraud: Penyalahgunaan dalam proses penyediaan barang, seperti memanipulasi jumlah dan penggunaan barang untuk kepentingan pribadi	Pegawai melakukan manipulasi jumlah dan penggunaan barang	ROO.26.05.206.40	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pengawasan dan pemakaian barang secara berkala	Internal	C	Pemborosan anggaran dan potensi kerugian	Perangkat Daerah dan ASN dilingkup Perangkat Daerah

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
41	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan: Penyedia melakukan perubahan data rekening pembayaran tanpa konfirmasi	Mitra penyedia merubah data rekening	ROO.26.05.206.41	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tidak adanya prosedur double check dan verifikasi ulang terhadap rekening tujuan pembayaran	Eksternal	C	Pembayaran salah transfer ke rekening yang tidak sah atau tidak sesuai kontrak.	Perangkat Daerah, masing-masing ASN dan pekerja
42	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan persediaan barang dan jasa yang tepat waktu	Evaluasi	Risiko Operasional: Dokumen perjalanan dinas tidak lengkap	Pegawai menyerahkan dokumen perjalanan yang tidak lengkap	ROO.26.05.206.42	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dokumen pendukung hilang, rusak, atau terlambat diterima	Internal	C	Temuan audit terkait kelengkapan dokumen	Perangkat Daerah dan ASN dilingkup Perangkat Daerah
43	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Evaluasi	Risiko Operasional: Kebutuhan sarana dan prasarana kantor belum sepenuhnya terakomodir	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian memiliki keterbatasan anggaran untuk mengakomodir Kebutuhan sarana dan prasarana kantor sepenuhnya	ROO.26.05.206.43	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Keterbatasan alokasi anggaran untuk mencukupi prioritas kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Internal	C	Pelayanan yang diberikan menjadi kurang maksimal	Perangkat Daerah dan ASN dilingkup Perangkat Daerah
44	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Perencanaan	Resiko Fraud: Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dibeli sementara nilai (harga) tidak berubah	PPTK Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dibeli sementara nilai (harga) tidak berubah	ROO.26.05.206.44	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil	Internal	C	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan kebutuhan	Perangkat Daerah dan masing-masing ASN
45	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Perencanaan	Resiko Operasional : Menetapkan barang yang tidak sesuai kebutuhan di DPA	PPTK Menetapkan barang yang tidak sesuai kebutuhan di DPA	ROO.26.05.206.45	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	kurangnya komunikasi antar pegawai terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Internal	C	Tidak terpakainya barang yang telah dibeli	Perangkat Daerah dan masing-masing ASN
46	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Laporan Pengadaan	Pelaksanaan	Resiko Kemitraan :Penyedia memberikan Barang yang tidak	Penyedia memberikan Barang yang	ROO.26.05.206.46	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurang adanya pemantauan saat proses pesanan	Eksternal	C	Kualitas barang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga	Perangkat Daerah dan ASN dilingkup

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah		sesuai pesanan	tidak sesuai pesanan						elayanan menjadi kurang efektif dan efisien	Perangkat Daerah
47	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Risiko Operasional: Pelaksanaan layanan penunjang pemerintah daerah belum optimal	PPTK belum optimal memberikan layanan penunjang pemerintah daerah	ROO.26.05.206.47	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurang koordinasi internal	Internal	C	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal	Perangkat Daerah dan ASN dilingkup Perangkat Daerah
48	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Risiko Operasional :Adanya Keterlambatan Pembayaran	PPTK terlambat melakukan pembayaran air dan listrik	ROO.26.05.206.48	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Petugas lalai dalam melakukan pembayaran	Internal	C	Terjadi pemutusan sementara	Perangkat Daerah dan ASN dilingkup Perangkat Daerah
49	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Risiko Fraud : Menciptakan kerusakan baru atau melebih-lebihkan tingkat kerusakan agar biaya perbaikan meningkat	Penyedia menambah kerusakan atau membesarkan kerusakan yang ada agar biaya perbaikan terlihat lebih tinggi	ROO.26.05.206.49	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar	Eksternal	C	Merusak hubungan antara pelanggan dan penyedia jasa.	Perangkat Daerah dan ASN dilingkup Perangkat Daerah
50	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Pelaksanaan	Risiko Kemitraan : Tenaga kebersihan kurang kompeten	Vendor memberikan tenaga kebersihan yang kurang kompeten	ROO.26.05.206.50	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Vendor tidak memberikan pelatihan yang cukup kepada pekerjanya	Eksternal	C	Kantor kurang bersih sehingga produktivitas dan kenyamanan kerja berkurang	Perangkat Daerah dan ASN dilingkup Perangkat Daerah
51	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan	Pelaksanaan	Risiko Oprasional: Sarana dan prasarana	Pegawai kurang merawat	ROO.26.05.206.51	Kasubbag Umum dan	Rendahnya kepedulian pegawai untuk	Internal	C	Terhambatnya pelaksanaan	Perangkat Daerah dan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko					Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Skenario Risiko (siapa (who) melakukan apa (what))	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah		penunjang kantor kurang terpelihara	Sarana dan prasarana penunjang kantor		Kepegawaian	memelihara sarana dan prasarana penunjang kantor			kegiatan pada masing-masing bidang	ASN dilingkup Perangkat Daerah
52	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Evaluasi	Risiko Fraud: Penyedia jasa membuat tagihan lebih tinggi dari biaya sebenarnya atau menagih servis yang tidak pernah dilakukan	Penyedia jasa melakukan mark up tagihan dan manipulasi laporan servis	ROO.26.05.206.52	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan sehingga dimanfaatkan oleh penyedia jasa pihak ketiga untuk memaksimalkan profit dan mencari keuntungan	Eksternal	C	Anggaran dibayarkan lebih besar daripada nilai pekerjaan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian	Perangkat Daerah dan ASN dilingkup Perangkat Daerah
53	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Perencanaan	Risiko Operasional: Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	PPTK menganggarkan pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.05.206.53	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terlalu banyaknya peralatan dan mesin yang rusak karena penggunaan terus menerus sehingga mudah rusak	Internal	C	Peralatan dan mesin belum terpelihara secara menyeluruh sehingga menghambat pekerjaan	Perangkat Daerah dan ASN dilingkup Perangkat Daerah
54	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Pelaksanaan	Resiko Kemitraan : Penyedia Tidak memiliki tenaga ahli yang memadai	Penyedia memberikan tenaga ahli yang kurang kompeten	ROO.26.05.206.54	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penyedia tidak merekrutmen tenaga ahli yang kompeten dan atau tidak memberikan pelatihan yang cukup kepada pekerjanya	Eksternal	C	Terjadinya keterlambatan pekerjaan	Perangkat Daerah dan ASN dilingkup Perangkat Daerah

B. HASIL ANALISIS RISIKO

Analisis risiko merupakan proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka untuk menetapkan peta risiko. Analisis risiko dapat dilakukan dengan menetapkan level risiko, memilah risiko berdasarkan level dan menyusun peta risiko. Setelah tahapan identifikasi risiko, kemudian dilakukan analisis risiko sesuai urutan kategori serta Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang merupakan hasil dari evaluasi dampak dan kemungkinan dari risiko yang telah diidentifikasi. Setiap setiap risiko prioritas akan dianalisis lebih dalam untuk mengetahui celah pengendalian yang sudah ada kemudian akan dilakukan perbaikan dengan menyusun strategi RTP yang lebih optimal. Strategi ini mencakup penentuan target waktu penyelesaian dalam kurun waktu satu tahun.

Untuk menetapkan kategori risiko, dilakukan survei terhadap seluruh pegawai Bakesbangpol Kabupaten Lamongan. Hasil survei ini menghasilkan urutan kategori dari seluruh kemungkinan dan dampak risiko yang akan terjadi. Untuk lebih jelasnya mengenai hasil analisis risiko ini dapat diuraikan pada Tabel 2.7 dan Tabel 2.8 sebagai berikut:

Tabel 2. 7 Daftar Risiko Strategis Prioritas Tahun 2026

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Terjadi konflik berulang memperdalam polarisasi antar kelompok	RSO.26.05.206.01	9	Kepala Bakesbangpol	1. Masalah mendasar belum teratasi sepenuhnya 2. Salah satu pihak merasa dirugikan oleh hasil mediasi atau merasa dipaksa untuk setuju 3. Masih ada ketidak hadiran ruang komunikasi yang efektif	Konflik menjadi besar dan menimbulkan keresahan masyarakat karena terganggunya keamanan dan ketertiban
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan tema kegiatan	RSO.26.05.206.02	2	Kepala Bakesbangpol	Permintaan materi kurang spesifik	Pemahaman peserta terkait pendidikan politik tidak mengalami peningkatan
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: Rendahnya partisipasi kelompok rentan (difabel, lansia)	RSO.26.05.206.03	6	Kepala Bakesbangpol	Akses informasi dan fasilitas terbatas	Ketimpangan partisipasi
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Rendahnya partisipasi pemilih pemula	RSO.26.05.206.04	6	Kepala Bakesbangpol	Rendahnya ketertarikan masyarakat pemula dalam partisipasi politik	Potensi kehilangan pemilih masa depan
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Rendahnya partisipasi pemilih secara umum	RSO.26.05.206.05	7	Kepala Bakesbangpol	Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemilu	Target partisipasi pemilih tidak tercapai
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Jumlah responden tidak tercapai	RSO.26.05.206.06	5	Kepala Bakesbangpol	Masyarakat tidak mengetahui adanya survey kepuasan masyarakat terhadap layanan	Kevalidan hasil SKM diragukan
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.26.05.206.07	7	Kepala Bakesbangpol	Pemanfaatan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum optimal	Kurang efektif dan efisiennya penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan organisasi

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Kemitraan: Pelaporan penyusunan manajemen resiko pada sistem informasi pelaporan yang disediakan mitra OPD tidak optimal	RSO.26.05.206.08	10	Kepala Bakesbangpol	Kurang optimalnya sistem informasi pelaporan manajemen resiko yang stabil dan terintegrasi (data hilang)	Proses pelaporan manajemen resiko Perangkat Daerah tidak efektif dan efisien
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Penerapan manajemen resiko masih belum optimal	RSO.26.05.206.09	6	Kepala Bakesbangpol	Kurangnya pemahaman dan kesadaran akan pentingnya manajemen resiko organisasi	Efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan terhambat

Tabel 2. 8 Daftar Risiko Operasional Prioritas Tahun 2025

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional OPD Risiko Operasional: Jumlah laporan tidak sesuai target	ROO.26.05.206.01	3	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kurangnya kompetensi pegawai	Perumusan kebijakan teknis menjadi kurang maksimal
2	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan	ROO.26.05.206.02	4	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Alun-Alun digunakan untuk kegiatan lain	Persiapan pelaksanaan Upacara menjadi terganggu

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
3	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	ROO.26.05.206.03	5	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Adanya Instruksi BPIP yang secara mendadak mengubah jadwal pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila	Persiapan pelaksanaan Upacara menjadi terganggu
4	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Kemitraan: Keterbatasan kemampuan mitra	ROO.26.05.206.04	5	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kepengurusan DPPI hanya berjumlah 7 orang dan masing-masing memiliki kesibukan tersendiri	Tidak ada yang mengampu Paskibraka selama latihan dan bertugas
5	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Kurangnya minat peserta yang mendaftar untuk mengikuti sosialisasi	ROO.26.05.206.05	4	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Peserta yang mendaftar kurang dari target yang telah ditentukan	Sosialisasi terlihat sepi; Indikator kinerja terkait jumlah orang yang mengikuti kegiatan menjadi tidak tercapai
6	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Fraud: Terdapat peserta paskibraka yang tidak sesuai dengan kriteria	ROO.26.05.206.06	4	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Terdapat panitia seleksi yang meloloskan calon anggota paskibraka yang tidak sesuai kriteria atas dasar kepentingan pribadi	Timbulnya kesenjangan sosial dan menurunnya kredibilitas dalam seleksi paskibraka

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
7	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Jumlah laporan tidak sesuai target	ROO.26.05.206.07	3	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kurangnya kompetensi pegawai	Perumusan kebijakan teknis menjadi kurang maksimal
8	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Narasumber yang diminta tidak bisa hadir	ROO.26.05.206.08	3	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Adanya alasan tertentu atau force majeure sehingga narasumber tidak bisa hadir	Materi yang disampaikan terkadang tidak sesuai
9	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Fraud: Spesifikasi alkes tidak sesuai dengan perjanjian	ROO.26.05.206.09	5	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Wording yang ambigu menyebabkan interpretasi berbeda dengan penyedia	Alkes yang datang tidak sesuai spesifikasi
10	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Belum terinventarisir secara menyeluruh keberadaan aliran kepercayaan	ROO.26.05.206.10	8	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kurang optimalnya sosialisasi terhadap PB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri	Data Penghayat kepercayaan tidak terdeteksi sehingga timbulnya kegiatan penghayat kepercayaan yang meresahkan masyarakat karena tidak ada pengawasan

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
11	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Kemitraan: Kurang maksimalnya kinerja mitra	ROO.26.05.206.11	4	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Kurangnya koordinasi antara Bakesbangpol dengan MLKI	Bakesbangpol tidak memiliki data penghayat kepercayaan yang pasti
12	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: Jumlah peserta tidak memenuhi target	ROO.26.05.206.12	7	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan target yang sudah ditetapkan dalam renstra	Target keluaran tidak tercapai
13	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Kemitraan: Ditemukan Ketidaksesuaian prosentase alokasi kegiatan bersumber dana hibah parpol	ROO.26.05.206.13	5	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kurang pemahamannya pemahaman aturan penggunaan alokasi dana hibah	Kerugian negara
14	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Fraud : Laporan Hasil Monitoring dibuat tanpa turun ke lapangan (mark up kunjungan)	ROO.26.05.206.14	4	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Tidak adanya mekanisme verifikasi lapangan	Kegagalan Program
15	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Kemitraan: Terdapat Ormas yang melakukan tindakan tidak sesuai ataupun melenceng dengan tupoksinya	ROO.26.05.206.15	9	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kurang fahamnya Ormas terhadap Tupoksinya sebagai mitra pemerintah dalam menunjang pembangunan	Merusak tatanan sosial dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat
16	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional : Keterlambatan/lamanya penerbitan surat tanggapan keberadaan ormas	ROO.26.05.206.16	3	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Ormas tidak dapat memenuhi berkas persyaratan	Ormas tidak terdaftar

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
17	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Fraud : Intervensi bahan kebijakan oleh pihak eksternal	ROO.26.05.206.17	4	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Ormas Bergerak dibidang yang rentan terhadap kepentingan politik	Citra Pemerintah Daerah menjadi negatif
18	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Fraud: Pemberian imbalan atau hadiah/gratifikasi agar didahulukan/dipermudah dalam proses pelayanan atau pengurusan hibah ormas	ROO.26.05.206.18	4	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Kebiasaan masyarakat untuk memberikan hadiah sebagai ucapan terimakasih	Ketidakpercayaan masyarakat terhadap komitmen pelayanan publik
19	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: Kebijakan teknis yang dirumuskan tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan sehingga kurang efektif dalam pencegahan dan penanganan konflik	ROO.26.05.206.19	6	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mekanisme pengumpulan data wilayah tidak konsisten. 2. Laporan situasi sosial terlambat diterima. 3. Tidak ada verifikasi silang yang memadai antarinstansi. 4. Sistem pelaporan masih manual sehingga rawan ketidakakuratan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan teknis tidak tepat sasaran. 2. Antisipasi kerawanan sosial melemah. 3. Potensi konflik tidak tertangani secara optimal 4. Pemerintah daerah kehilangan ketepatan bukti dalam pengambilan keputusan.
20	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Kemitraan : Bahan Penyusunan kebijakan tidak lengkap atau tidak valid sehingga mengurangi kualitas analisis kewaspadaan	ROO.26.05.206.20	6	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	Tidak ada aturan wajib lapor, data dari instansi eksternal tidak seragam, lemahnya follow up permintaan data	Analisis kewaspadaan menjadi dangkal, potensi kerawanan tidak teridentifikasi, kebijakan kehilangan dasar empiris
21	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Kemitraan : koordinasi lintas sektor tidak efektif sehingga informasi kewaspadaan dan analisis menjadi tidak akurat	ROO.26.05.206.21	4	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	Tidak ada kewajiban hadir, jadwal koordinasi tidak diprioritaskan instansi, tidak ada sistem tindak lanjut rapat	Potensi kerawanan tidak terbaca, informasi simpang siur
22	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: Terlambatnya informasi monitoring wilayah	ROO.26.05.206.22	7	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	Kurangnya jumlah SDM yang berkompoten	Kesulitan pengambilan keputusan secara cepat dan tepat dalam mendeteksi konflik

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
23	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Fraud : manipulasi data pelaporan hasil monitoring	ROO.26.05.206.23	4	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak adanya mekanisme verifikasi silang antara laporan petugas dan laporan instansi vertikal. 2. Kurangnya pengawasan terhadap operator penginput data. 3. Sistem pelaporan masih manual sehingga rawan dimodifikasi. 4. Keterbatasan SDM sehingga kualitas pengawasan tidak konsisten 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi kewaspadaan menjadi tidak akurat dan menyesatkan. 2. Pemerintah daerah sulit mengambil keputusan berbasis bukti. 3. Potensi konflik tidak terdeteksi, berpotensi meningkat karena fakta lapangan tidak dilaporkan. 4. Hilangnya integritas data dan kepercayaan antarinstansi
24	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: dokumen hasil rapat forkopimda tidak menggambarkan kondisi nyata sehingga keputusan pimpinan daerah kurang tepat	ROO.26.05.206.24	4	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik	Format laporan tidak seragam, tidak ada verifikasi bahan sebelum rapat	Rekomendasi forkopimda tidak akurat, arah kebijakan bisa salah, respon terhadap ancaman lokal melemah
25	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: Pelaporan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada sistem informasi pelaporan tidak optimal	ROO.26.05.206.25	7	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Kurang optimalnya sistem informasi pelaporan dan pemantauan kinerja Perangkat Daerah yang tidak terintegrasi	Proses pelaporan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah tidak efektif dan efisien
26	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: Keterlambatan pengumpulan bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan dari bidang-bidang	ROO.26.05.206.26	4	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Kurangnya disiplin waktu dan tidak adanya timeline yang jelas atau perubahan jadwal secara mendadak	Proses penyusunan dokumen perencanaan terlambat selesai
27	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Fraud : Mark Up data realisasi kinerja	ROO.26.05.206.27	5	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Kekhawatiran berkurangnya tunjangan performa kinerja (TPP)	Hasil SAKIP kurang dapat dipertanggungjawabkan
28	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko kemitraan : ketidaksinkronan permintaan data klasifikasi dari pihak ketiga (BPS) dengan data di OPD	ROO.26.05.206.28	8	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Belum pernah adanya sosialisasi klasifikasi data dari pihak ketiga	Data bias tidak bisa digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan
29	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: Penyerapan anggaran tidak tepat waktu dan kurang maksimal	ROO.26.05.206.29	8	Kasubbag Keuangan	Kurangnya koordinasi dan komitmen antar instansi dalam penyusunan rencana anggaran dan kegiatan	Pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran menjadi terhambat dan tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
30	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Kemitraan: Keterlambatan pengiriman Rekom dari OPD Induk untuk pencairan TPP	ROO.26.05.206.30	9	Kasubbag Keuangan	Keterlambatan pengiriman rekom dari BPKD	Pegawai tidak menerima TPP tepat waktu
31	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Fraud: Mencatat belanja yang tidak dilakukan agar anggarannya "terpakai"	ROO.26.05.206.31	4	Kasubbag Keuangan	Target kinerja SKPD dikaitkan dengan tingkat penyerapan anggaran.	Belanja barang habis pakai yang tidak pernah diterima SKPD sehingga laporan akhir tahun dapat tepat waktu penyelesaiannya
32	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: laporan pertanggungjawaban atau dokumen pendukung tidak tepat waktu	ROO.26.05.206.32	6	Kasubbag Keuangan	Tidak ada mekanisme kontrol penyampaian dokumen (jadwal, daftar cek, atau verifikasi kelengkapan)	Laporan bulanan/triwulan/semester terlambat dikompilasi
33	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: Rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai	ROO.26.05.206.33	5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tidak adanya penerapan sanksi dan reward sehingga pegawai mengabaikan kedisiplinan	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan hingga menurunnya efektivitas kinerja organisasi
34	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Fraud: Pengadaan pakaian dinas yang tidak sesuai spesifikasi	ROO.26.05.206.34	3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya tidak sesuai standar
35	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Kemitraan: Mitra tidak mampu memenuhi kebutuhan teknis unit kerja	ROO.26.05.206.35	4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Materi diklat dari mitra mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan teknis tiao unit kerja 2. Ketergantungan tinggi pada pihak ketiga (perguruan tinggi atau lembaga diklat lain) yang dapat menghambat fleksibilitas organisasi dalam meningkatkan kemampuan pegawai secara mandiri 	Terjadi ketidaksesuaian kompetensi pegawai dengan tugas dan fungsi jabatan
36	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO.26.05.206.36	7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kebutuhan layanan administrasi belum sepenuhnya terakomodir	Pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang menjadi kurang maksimal
37	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Kualitas komponen yang tidak standar (berisiko menimbulkan bahaya)	ROO.26.05.206.37	4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil	Pelayanan masyarakat terganggu

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
38	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Proses pengadaan yang lama	ROO.26.05.206.38	8	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1. Kesalahan dalam merencanakan kas budget 2. Kerusakan peralatan secara bersamaan sehingga membutuhkan proses lebih untuk memisahkan mana yang urgent	Pelayanan internal menjadi tidak efektif
39	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Fraud: Pembuatan permintaan pembelian atau SPJ fiktif barang yang tidak pernah diterima atau digunakan oleh kantor	ROO.26.05.206.39	3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil	Kerugian negara
40	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Fraud: Penyalahgunaan dalam proses penyediaan barang, seperti memanipulasi jumlah dan penggunaan barang untuk kepentingan pribadi	ROO.26.05.206.40	3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pengawasan dan pemakaian barang secara berkala	Pemborosan anggaran dan potensi kerugian
41	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Kemitraan: Penyedia melakukan perubahan data rekening pembayaran tanpa konfirmasi	ROO.26.05.206.41	5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Tidak adanya prosedur double check dan verifikasi ulang terhadap rekening tujuan pembayaran	Pembayaran salah transfer ke rekening yang tidak sah atau tidak sesuai kontrak.
42	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Dokumen perjalanan dinas tidak lengkap	ROO.26.05.206.42	5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Dokumen pendukung hilang, rusak, atau terlambat diterima	Temuan audit terkait kelengkapan dokumen
43	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Kebutuhan sarana dan prasarana kantor belum sepenuhnya terakomodir	ROO.26.05.206.43	11	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Keterbatasan alokasi anggaran untuk mencukupi prioritas kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Pelayanan yang diberikan menjadi kurang maksimal
44	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Fraud: Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dibeli sementara nilai (harga) tidak berubah	ROO.26.05.206.44	4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pengendalian terhadap proses dan hasil	Kualitas barang/jasa tidak sesuai dengan kebutuhan
45	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Resiko Operasional : Menetapkan barang yang tidak sesuai kebutuhan di DPA	ROO.26.05.206.45	4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	kurangnya komunikasi antar pegawai terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Tidak terpakainya barang yang telah dibeli

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
46	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Kemitraan :Penyedia memberikan Barang yang tidak sesuai pesanan	ROO.26.05.206.46	4	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurang adanya pemantauan saat proses pesanan	Kualitas barang tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga pelayanan menjadi kurang efektif dan efisien
47	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Pelaksanaan layanan penunjang pemerintah daerah belum optimal	ROO.26.05.206.47	6	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurang koordinasi internal	Pelaksanaan kegiatan tidak optimal
48	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional :Adanya Keterlambatan Pembayaran	ROO.26.05.206.48	3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Petugas lalai dalam melakukan pembayaran	Terjadi pemutusan sementara
49	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Fraud : Menciptakan kerusakan baru atau melebih-lebihkan tingkat kerusakan agar biaya perbaikan meningkat	ROO.26.05.206.49	3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar	Merusak hubungan antara pelanggan dan penyedia jasa.
50	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Kemitraan : Tenaga kebersihan kurang kompeten	ROO.26.05.206.50	6	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Vendor tidak memberikan pelatihan yang cukup kepada pekerjanya	Kantor kurang bersih sehingga produktivitas dan kenyamanan kerja berkurang
51	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Oprasional: Sarana dan prasarana penunjang kantor kurang terpelihara	ROO.26.05.206.51	7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Rendahnya kepedulian pegawai untuk memelihara sarana dan prasarana penunjang kantor	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan pada masing-masing bidang
52	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Fraud: Penyedia jasa membuat tagihan lebih tinggi dari biaya sebenarnya atau menagih servis yang tidak pernah dilakukan	ROO.26.05.206.52	5	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Kurangnya pengawasan dan pemeriksaan sehingga dimanfaatkan oleh penyedia jasa pihak ketiga untuk memaksimalkan profit dan mencari keuntungan	Anggaran dibayarkan lebih besar daripada nilai pekerjaan yang sebenarnya sehingga menyebabkan kerugian
53	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Operasional: Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.05.206.53	7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terlalu banyaknya peralatan dan mesin yang rusak karena penggunaan terus menerus sehingga mudah rusak	Peralatan dan mesin belum terpelihara secara menyeluruh sehingga menghambat pekerjaan
54	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Risiko Kemitraan : Penyedia Tidak memiliki tenaga ahli yang memadai	ROO.26.05.206.54	6	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penyedia tidak merekrutmen tenaga ahli yang kompeten dan atau tidak memberikan pelatihan yang cukup kepada pekerjanya	Terjadinya keterlambatan pekerjaan

Adapun skala kemungkinan dan dampak yang digunakan dalam penilaian risiko sebagaimana tercantum pada Tabel 2.9 sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Skala Kemungkinan dan Dampak

TINGKAT KEMUNGKINAN		TINGKAT DAMPAK				
URAIAN	KEMUNGKINAN	SANGAT KECIL	KECIL	SEDANG	BESAR	SANGAT BESAR
		1	2	3	4	5
SANGAT SERING	5	5	10	15	20	25
SERING	4	4	8	12	16	20
CUKUP SERING	3	3	6	9	12	15
JARANG	2	2	4	6	8	10
SANGAT JARANG	1	1	2	3	4	5

C. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Berikut akan dijabarkan mengenai pengendalian yang sudah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan terhadap penanggulangan risiko strategis dan operasional yang telah diidentifikasi dan telah dilaksanakan yang dapat kami jabarkan ke dalam matriks tabel 2.10 sebagai berikut :

Tabel 2. 10 Pengendalian yang Sudah Dilakukan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
1	Risiko Operasional: Terjadi konflik berulang memperdalam polarisasi antar kelompok	RSO.26.05.206.01	Tim Kewaspadaan dini daerah, tim penanganan konflik, dan Pembinaan pada masyarakat melalui sosialisasi wawasan kebangsaan
2	Risiko Operasional: Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan tema kegiatan	RSO.26.05.206.02	Memberikan kisi-kisi materi yang diharapkan untuk disampaikan
3	Risiko Operasional: Rendahnya partisipasi kelompok rentan (difabel, lansia)	RSO.26.05.206.03	Sosialisasi pendidikan politik
4	Risiko Operasional: Rendahnya partisipasi pemilih pemula	RSO.26.05.206.04	Sosialisasi pendidikan politik
5	Risiko Operasional: Rendahnya partisipasi pemilih secara umum	RSO.26.05.206.05	Sosialisasi pemilu oleh penyelenggara
6	Risiko Operasional: Jumlah responden tidak tercapai	RSO.26.05.206.06	Menyebarkan luaskan informasi SKM menggunakan media sosial
7	Risiko Operasional: Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.26.05.206.07	Monitoring dan evaluasi rencana aksi kegiatan setiap tribulan dalam bentuk rapat dan laporan tribulan
8	Risiko Kemitraan: Pelaporan penyusunan manajemen resiko pada sistem informasi pelaporan yang disediakan mitra OPD tidak	RSO.26.05.206.08	Melakukan koordinasi dengan mitra OPD terkait

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
	optimal		
9	Risiko Operasional: Penerapan manajemen risiko masih belum optimal	RSO.26.05.206.09	Melakukan pemetaan risiko strategis dan operasional pada masing-masing bidang
1	Risiko Operasional: Jumlah laporan tidak sesuai target	ROO.26.05.206.01	Memberikan reward dan punishment
2	Risiko Operasional: Perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan	ROO.26.05.206.02	Berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait prioritas penggunaan Alun-Alun saat kegiatan HBN (Hari Besar Nasional)
3	Risiko Operasional: Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	ROO.26.05.206.03	Berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait pengunduran jadwal pelaksanaan Upacara tersebut
4	Risiko Kemitraan: Keterbatasan kemampuan mitra	ROO.26.05.206.04	Berkoordinasi dengan DPPI untuk memitigasi hal tersebut
5	Risiko Operasional: Kurangnya minat peserta yang mendaftar untuk mengikuti sosialisasi	ROO.26.05.206.05	Menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi mengenai kegiatan yang dimaksud
6	Risiko Fraud: Terdapat peserta paskibraka yang tidak sesuai dengan kriteria	ROO.26.05.206.06	Bimtek panitia seleksi dalam pembentukan Paskibraka
7	Risiko Operasional: Jumlah laporan tidak sesuai target	ROO.26.05.206.07	Memberikan reward dan punishment
8	Risiko Operasional: Narasumber yang diminta tidak bisa hadir	ROO.26.05.206.08	Konfirmasi kehadiran narasumber
9	Risiko Fraud: Spesifikasi alkes tidak sesuai dengan perjanjian	ROO.26.05.206.09	Memastikan kepada penyedia bahwa barang yang dikirimkan sesuai spesifikasi
10	Risiko Operasional: Belum terinventarisir secara menyeluruh keberadaan aliran kepercayaan	ROO.26.05.206.10	Monitoring Aliran Kepercayaan
11	Risiko Kemitraan: Kurang maksimalnya kinerja mitra	ROO.26.05.206.11	Koordinasi dengan MLKI
12	Risiko Oprasional: Jumlah peserta tidak memenuhi target	ROO.26.05.206.12	Melaksanakan kerjasama/sinergitas kegiatan dengan perguruan tinggi,sekolah, pondok pesantren dan lembaga lainnya
13	Resiko Kemitraan: Ditemukan Ketidaksesuaian prosentase alokasi kegiatan bersumber dana hibah parpol	ROO.26.05.206.13	Sosialisasi oleh pihak Bakesbangpol
14	Resiko Fraud : Laporan Hasil Monitoring dibuat tanpa turun ke lapangan (mark up kunjungan)	ROO.26.05.206.14	Dokumentasi lapangan berbukti waktu dan lokasi (foto geotag)
15	Resiko Kemitraan: Terdapat Ormas yang melakukan tindakan tidak sesuai ataupun melenceng dengan tupoksinya	ROO.26.05.206.15	Pembinaan Ormas
16	Resiko Operasional : Keterlambatan/lamanya penerbitan surat tanggapan keberadaan ormas	ROO.26.05.206.16	Menggunakan formulir digital dan basis data terintegrasi
17	Resiko Fraud : Intervensi bahan kebijakan oleh pihak eksternal	ROO.26.05.206.17	Memastikan setiap perubahan draft memiliki justifikasi tertulis
18	Resiko Fraud: Pemberian imbalan atau hadiah/gratifikasi agar didahulukan/dipermudah dalam proses pelayanan atau pengurusan hibah ormas	ROO.26.05.206.18	SOP dan Standar Pelayanan serta penandatanganan pakta integritas
19	Risiko Oprasional: Kebijakan teknis yang dirumuskan tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan sehingga kurang efektif dalam pencegahan dan penanganan konflik	ROO.26.05.206.19	Rapat evaluasi data secara triwulan. Laporan kewaspadaan dari FKDM dan perangkat kecamatan. Koordinasi lintas sektor dengan POLRES, KODIM, BIN. Formulir laporan standar untuk penyusunan bahan kebijakan
20	Resiko Kemitraan : Bahan Penyusunan kebijakan tidak lengkap atau tidak valid sehingga mengurangi kualitas analisis kewaspadaan	ROO.26.05.206.20	permintaan data melalui surat, rapat koordinasi dan grup komunikasi instansi

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
21	Resiko Kemitraan : koordinasi lintas sektor tidak efektif sehingga informasi kewaspadaan dan analisis menjadi tidak akurat	ROO.26.05.206.21	forum koordinasi rutin, rapat FKDM, pemantauan isu strategis
22	Risiko Oprasional: Terlambatnya infomasi monitoring wilayah	ROO.26.05.206.22	Tim Monitoring Perangkat Daerah
23	Resiko Fraud : manipulasi data pelaporan hasil monitoring	ROO.26.05.206.23	Penggunaan format laporan monitoring yang baku. Laporan monitoring wajib diverifikasi oleh koordinator tim sebelum dikirim ke pimpinan. Rapat evaluasi bulanan untuk klarifikasi data yang meragukan. Koordinasi rutin dengan KODIM, POLRES, BIN untuk cross-check situasi wilayah.
24	Risiko Oprasional: dokumen hasil rapat forkopimda tidak menggambarkan kondisi nyata sehingga keputusan pimpinan daerah kurang tepat	ROO.26.05.206.24	rapat rutin bulanan forkopimda
25	Risiko Oprasional: Pelaporan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada sistem informasi pelaporan tidak optimal	ROO.26.05.206.25	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
26	Risiko Oprasional: Keterlambatan pengumpulan bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan dari bidang-bidang	ROO.26.05.206.26	Melakukan koordinasi dengan masing-masing bidang dan Perangkat Daerah terkait.
27	Resiko Fraud : Mark Up data realisasi kinerja	ROO.26.05.206.27	Melakukan rapat monitoring rencana aksi hasil kegiatan setiap triwulan dan koordinasi secara rutin
28	Resiko kemitraan : ketidaksinkronan permintan data klasifikasi dari pihak ketiga (BPS) dengan data di OPD	ROO.26.05.206.28	Melakukan koordinasi secara online
29	Risiko Oprasional: Penyerapan anggaran tidak tepat waktu dan kurang maksimal	ROO.26.05.206.29	1). Melaksanakan monev serta koordinasi dengan PPTK terkait rencana kegiatan kedepan; 2). Melakukan proses perubahan/ pergeseran anggaran.
30	Risiko Kemitraan: Keterlambatan pengiriman Rekom dari OPD Induk untuk pencairan TPP	ROO.26.05.206.30	Melaksanakan koordinasi dengan BPKAD
31	Risiko Fraud: Mencatat belanja yang tidak dilakukan agar anggarannya "terpakai"	ROO.26.05.206.31	1. Melakukan sosialisasi aturan kode etik dan SOP 2. Verifikasi berjenjang mengenai pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan
32	Risiko Oprasional: laporan pertanggungjawaban atau dokumen pendukung tidak tepat waktu	ROO.26.05.206.32	Melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait
33	Risiko Oprasional: Rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai	ROO.26.05.206.33	Penyusunan dan sosialisasi aturan kedisiplinan pegawai
34	Resiko Fraud: Pengadaan pakaian dinas yang tidak sesuai spesifikasi	ROO.26.05.206.34	Proses pengadaan diawasi untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai spesifikasi
35	Risiko Kemitraan: Mitra tidak mampu memenuhi kebutuhan teknis unit kerja	ROO.26.05.206.35	1. Mengikuti diklat dan pelatihan dari BKPSDM 2. Mengikuti seminar zoom online yang berkaitan dengan tupoksi
36	Risiko Operasional: Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO.26.05.206.36	Evaluasi pembagian tugas secara berkala sesuai jabatan masing-masing.
37	Risiko Operasional: Kualitas komponen yang tidak standar (berisiko menimbulkan bahaya)	ROO.26.05.206.37	Pengadaan cadangan komponen listrik
38	Risiko Operasional: Proses pengadaan yang lama	ROO.26.05.206.38	1. Melakukan perubahan Kas Budget saat PAK 2. Melakukan pengecekan fisik secara berkala untuk memastikan kelayakan fungsi dan keamanan peralatan
39	Risiko Fraud: Pembuatan permintaan pembelian atau SPJ fiktif barang yang tidak pernah	ROO.26.05.206.39	Proses pencocokan data dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keaslian transaksi

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)
	diterima atau digunakan oleh kantor		
40	Risiko Fraud: Penyalahgunaan dalam proses penyediaan barang, seperti memanipulasi jumlah dan penggunaan barang untuk kepentingan pribadi	ROO.26.05.206.40	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara langsung
41	Risiko Kemitraan: Penyedia melakukan perubahan data rekening pembayaran tanpa konfirmasi	ROO.26.05.206.41	Pembayaran harus disetujui oleh PPK dan bendahara sebelum ditransfer ke rekening penyedia
42	Risiko Operasional: Dokumen perjalanan dinas tidak lengkap	ROO.26.05.206.42	Mempunyai arsip dan dokumentasi kelengkapan dokumen perjalanan dinas
43	Risiko Operasional: Kebutuhan sarana dan prasarana kantor belum sepenuhnya terakomodir	ROO.26.05.206.43	Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan prioritas kebutuhan.
44	Risiko Fraud: Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dibeli sementara nilai (harga) tidak berubah	ROO.26.05.206.44	Penandatanganan pakta integritas
45	Risiko Operasional : Menetapkan barang yang tidak sesuai kebutuhan di DPA	ROO.26.05.206.45	Penyusunan kebutuhan Sarana dan Prasarana atas usulan yang ada
46	Risiko Kemitraan :Penyedia memberikan Barang yang tidak sesuai pesanan	ROO.26.05.206.46	Proses pencocokan data dilakukan untuk memastikan barang sesuai dengan pesanan
47	Risiko Operasional: Pelaksanaan layanan penunjang pemerintah daerah belum optimal	ROO.26.05.206.47	Perencanaan dan penganggaran Tahun 2026
48	Risiko Operasional :Adanya Keterlambatan Pembayaran	ROO.26.05.206.48	Pembagian tugas berdasarkan tupoksi
49	Risiko Fraud : Menciptakan kerusakan baru atau melebihi-lebihkan tingkat kerusakan agar biaya perbaikan meningkat	ROO.26.05.206.49	Melakukan pemeriksaan kerusakan oleh dua pihak independen (misalnya teknisi internal dan auditor teknis
50	Risiko Kemitraan : Tenaga kebersihan kurang kompeten	ROO.26.05.206.50	Memilih vendor yang terbaik
51	Risiko Oprasional: Sarana dan prasarana penunjang kantor kurang terpelihara	ROO.26.05.206.51	Inventarisasi dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana kantor secara berkala serta peningkatan pengawasan pemegang barang milik negara.
52	Risiko Fraud: Penyedia jasa membuat tagihan lebih tinggi dari biaya sebenarnya atau menagih servis yang tidak pernah dilakukan	ROO.26.05.206.52	Dilakukan pemeriksaan fisik dan hasil pekerjaan sebelum pembayaran disetujui
53	Risiko Operasional: Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.05.206.53	Menjaga peralatan tetap berfungsi optimal dan memperpanjang masa pakainya
54	Risiko Kemitraan : Penyedia Tidak memiliki tenaga ahli yang memadai	ROO.26.05.206.54	Koordinasi ke pihak vendor atau penyedia

D. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Sebagai upaya lanjutan dalam proses manajemen risiko, di mana setelah dilakukan penilaian terhadap risiko-risiko yang paling signifikan (prioritas), ditemukan bahwa pengendalian yang telah diterapkan belum sepenuhnya mampu menutup celah atau kelemahan yang ada. Hasil identifikasi dari pengendalian yang ada, masih dibutuhkan atau perlu dibangun rencana tindak pengendalian baru untuk masing-masing risiko prioritas. Pengendalian yang masih dibutuhkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan dapat dilihat pada tabel 2.11 sebagai berikut:

Tabel 2. 11 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendalian
Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:									
1	Risiko Operasional: Terjadi konflik berulang memperdalam polarisasi antar kelompok	RSO.26.05.206.01	Tim Kewaspadaan dini daerah, tim penanganan konflik, dan Pembinaan pada masyarakat melalui sosialisasi wawasan kebangsaan	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Pembuatan buku saku penanganan konflik sosial Pembentukan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	Kepala Bakesbangpol	Desember 2026	-	-
2	Risiko Operasional: Materi yang disampaikan tidak sesuai dengan tema kegiatan	RSO.26.05.206.02	Memberikan kisi-kisi materi yang diharapkan untuk disampaikan	Belum optimal	Menjelaskan tema/ sub tema kegiatan, serta peserta dalam surat permintaan narasumber	Kepala Bakesbangpol	September 2026	-	-
3	Risiko Oprasional: Rendahnya partisipasi kelompok rentan (difabel, lansia)	RSO.26.05.206.03	Sosialisasi pendidikan politik	Belum menyeluruh dan spesifik sasaran yang dituju serta sistematis belum optimal	Program inklusif & fasilitasi khusus	Kepala Bakesbangpol	Desember 2029	-	-
4	Risiko Operasional: Rendahnya partisipasi pemilih pemula	RSO.26.05.206.04	Sosialisasi pendidikan politik	Metode kurang menarik bagi generasi muda	Kampanye digital & konten kreatif	Kepala Bakesbangpol	Desember 2029	-	-
5	Risiko Operasional: Rendahnya partisipasi pemilih secara umum	RSO.26.05.206.05	Sosialisasi pemilu oleh penyelenggara	Sosialisasi belum menjangkau seluruh kelompok masyarakat	Memperluas kampanye pendidikan pemilih melalui media sosial, komunitas, dan tokoh masyarakat	Kepala Bakesbangpol	Desember 2029	-	-
6	Risiko Operasional: Jumlah responden tidak tercapai	RSO.26.05.206.06	Menyebarkan luaskan informasi SKM menggunakan media sosial	Tidak semua masyarakat mengetahui media sosial OPD sehingga yang dapat dijangkau sementara penyebaran pada forum grup secara online	Petugas Pelayanan memberikan form SKM dengan segera setelah masyarakat mendapatkan pelayanan	Kepala Bakesbangpol	Juni dan Oktober 2026	-	-
7	Risiko Operasional: Implementasi sistem akuntabilitas kinerja internal pemerintah belum berjalan optimal	RSO.26.05.206.07	Monitoring dan evaluasi rencana aksi kegiatan setiap tribulan dalam bentuk rapat dan laporan tribulan	Pelaksanaan rapat tribulan belum terlaksana secara konsisten dan belum melibatkan seluruh pegawai	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Kepala Bakesbangpol	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September, Desember)	-	-

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendalian
8	Risiko Kemitraan: Pelaporan penyusunan manajemen resiko pada sistem informasi pelaporan yang disediakan mitra OPD tidak optimal	RSO.26.05.206.08	Melakukan koordinasi dengan mitra OPD terkait	Aplikasi sistem informasi pelaporan manajemen resiko perangkat daerah sering error	Melakukan back up data pelaporan manajemen resiko untuk mengantisipasi kerusakan data pada aplikasi	Kepala Bakesbangpol	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September, Desember)	-	-
9	Risiko Operasional: Penerapan manajemen resiko masih belum optimal	RSO.26.05.206.09	Melakukan pemetaan risiko strategis dan operasional pada masing-masing bidang	Kesadaran dan pemahaman tentang manajemen risiko yang kurang memadai	Melakukan review terhadap efektivitas pengendalian risiko secara berkala	Kepala Bakesbangpol	Desember 2026	-	-
Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:									
1	Risiko Operasional: Jumlah laporan tidak sesuai target	ROO.26.05.206.01	Memberikan reward dan punishment	Belum optimal	Koordinasi	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Desember 2026	-	-
2	Risiko Operasional: Perubahan lokasi pelaksanaan kegiatan	ROO.26.05.206.02	Berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait prioritas penggunaan Alun-Alun saat kegiatan HBN (Hari Besar Nasional)	Belum optimal	Koordinasi lintas OPD	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Juni 2026	-	-
3	Risiko Operasional: Perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan	ROO.26.05.206.03	Berkoordinasi dengan semua stakeholder terkait pengunduran jadwal pelaksanaan Upacara tersebut	Belum optimal	Koordinasi dengan semua stakeholder	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Juni 2026	-	-
4	Risiko Kemitraan: Keterbatasan kemampuan mitra	ROO.26.05.206.04	Berkoordinasi dengan DPPI untuk memitigasi hal tersebut	Belum optimal	Melibatkan PPI (Purna Paskibraka Indonesia) untuk mengampu Paskibraka	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Juni 2026	-	-
5	Risiko Operasional: Kurangnya minat peserta yang mendaftar untuk	ROO.26.05.206.05	Menggunakan media sosial untuk menyebarluaskan informasi mengenai	Belum optimal	Melibatkan Paskibraka atau Capaska untuk ikut dalam sosialisasi	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan	Juni 2026	-	-

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendalian
	mengikuti sosialisasi		kegiatan yang dimaksud			Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama			
6	Risiko Fraud: Terdapat peserta paskibraka yang tidak sesuai dengan kriteria	ROO.26.05.206.06	Bimtek panitia seleksi dalam pembentukan Paskibraka	Belum optimal	Penandatanganan Pakta Integritas panitia seleksi Paskibraka	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Maret 2026	-	-
7	Risiko Operasional: Jumlah laporan tidak sesuai target	ROO.26.05.206.07	Memberikan reward dan punishment	Belum optimal	Koordinasi	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Desember 2026	-	-
8	Risiko Operasional: Narasumber yang diminta tidak bisa hadir	ROO.26.05.206.08	Konfirmasi kehadiran narasumber	Belum optimal	Konfirmasi ulang kehadiran narasumber paling lambat sehari sebelum pelaksanaan kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	September 2026	-	-
9	Risiko Fraud: Spesifikasi alkes tidak sesuai dengan perjanjian	ROO.26.05.206.09	Memastikan kepada penyedia bahwa barang yang dikirimkan sesuai spesifikasi	Belum optimal	Konfirmasi ulang kepada penyedia	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Oktober 2026	-	-
10	Risiko Operasional: Belum terinventarisir secara menyeluruh keberadaan aliran kepercayaan	ROO.26.05.206.10	Monitoring Aliran Kepercayaan	Belum dilakukan diberbagai wilayah secara menyeluruh	Koordinasi dengan pemerintah desa, kejaksaan dan opd terkait lainnya dalam pemantauan aliran kepercayaan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	September 2026	-	-
11	Risiko Kemitraan: Kurang	ROO.26.05.206.11	Koordinasi dengan MLKI	Belum optimal	Koordinasi dengan pemerintah	Kabid Ideologi	September	-	-

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendalian
	maksimalnya kinerja mitra				desa, kejaksaan dan opd terkait lainnya dalam pemantauan aliran kepercayaan	Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	2026		
12	Risiko Oprasional: Jumlah peserta tidak memenuhi target	ROO.26.05.206.12	Melaksanakan kerjasama/sinergitas kegiatan dengan perguruan tinggi,sekolah, pondok pesantren dan lembaga lainnya	Sosialisasi pendidikan politik yang dilakukan oleh lembaga lain terkadang tidak dilakukan setiap tahun	Membuat telaah staf terkait penambahan dukungan anggaran sesuai dengan Kemendagri Nomor 000.10.3/e-844/polpum untuk disampaikan kepada Bappelitbangda	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Mei 2026	-	-
13	Resiko Kemitraan: Ditemukan Ketidaksesuaian prosentase alokasi kegiatan bersumber dana hibah parpol	ROO.26.05.206.13	Sosialisasi oleh pihak Bakesbangpol	Narasumber kurang menguasai materi	Pembinaan untuk peningkatan pertanggungjawaban pengelolaan hibah parpol dengan bekerjasama dengan BPKP sebagai narasumber	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	September 2026	-	-
14	Resiko Fraud : Laporan Hasil Monitoring dibuat tanpa turun ke lapangan (mark up kunjungan)	ROO.26.05.206.14	Dokumentasi lapangan berbukti waktu dan lokasi (foto geotag)	Dokumentasi tidak disertai waktu dan lokasi	Pembinaan untuk peningkatan pertanggungjawaban laporan hasil monitoring	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Setiap Bulan 2026	-	-
15	Resiko Kemitraan: Terdapat Ormas yang melakukan tindakan tidak sesuai ataupun melenceng dengan tupoksinya	ROO.26.05.206.15	Pembinaan Ormas	Belum dilakukan secara menyeluruh	Rapat Koordinasi TIMDU Pengawasan Ormas	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	November 2026	-	-
16	Resiko Operasional : Keterlambatan/lamanya penerbitan surat tanggapan keberadaan ormas	ROO.26.05.206.16	Menggunakan formulir digital dan basis data terintegrasi	Kurangnya pemahaman digital oleh ormas	Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan digital kepada Ormas	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Setiap Bulan 2026	-	-
17	Resiko Fraud : Intervensi bahan kebijakan oleh pihak eksternal	ROO.26.05.206.17	Memastikan setiap perubahan draft memiliki justifikasi tertulis	Justifikasi dapat direkayasa	Melakukan pencatatan setiap perubahan draft disertai alasan tertulis	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	November 2026	-	-
18	Resiko Fraud: Pemberian imbalan atau hadiah/gratifikasi agar didahulukan/dipermudah dalam proses pelayanan atau pengurusan hibah	ROO.26.05.206.18	SOP dan Standar Pelayanan serta penandatanganan pakta integritas	Belum adanya penerapan sanksi/punishman	Melakukan sistem reward dan punishman terhadap pegawai berprestasi ataupun pegawai yang menyimpang	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Setiap Bulan 2026	-	-

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendalian
	ormas								
19	Risiko Oprasional: Kebijakan teknis yang dirumuskan tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan sehingga kurang efektif dalam pencegahan dan penanganan konflik	ROO.26.05.206.19	Rapat evaluasi data secara triwulan. Laporan kewaspadaan dari FKDM dan perangkat kecamatan. Koordinasi lintas sektor dengan POLRES, KODIM, BIN. Formulir laporan standar untuk penyusunan bahan kebijakan	Tidak ada jadwal baku update data wilayah. Validasi lintas instansi tidak dilakukan secara rutin. Laporan manual mudah terlambat dan tidak terdokumentasi dengan baik	Menetapkan SOP pengumpulan dan verifikasi data wilayah. Menetapkan jadwal pembaruan data setiap bulan. Melakukan verifikasi silang dengan POLRES, KODIM, BIN, dan kecamatan. Membentuk tim supervisi data untuk memastikan akurasi sebelum penyusunan kebijakan	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Maret, Juni, September, Desember 2026)	-	-
20	Resiko Kemitraan : Bahan Penyusunan kebijakan tidak lengkap atau tidak valid sehingga mengurangi kualitas analisis kewaspadaan	ROO.26.05.206.20	permintaan data melalui surat, rapat koordinasi dan grup komunikasi instansi	tidak ada format baku data, deadline longgar, kepatuhan rendah	menyusun template data, menerapkan deadline wajib lapor, kalender koordinas, penanggung jawab dari tiap instansi	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 Bulan (Januari-Desember 2026)	-	-
21	Resiko Kemitraan : koordinasi lintas sektor tidak efektif sehingga informasi kewaspadaan dan analisis menjadi tidak akurat	ROO.26.05.206.21	forum koordinasi rutin, rapat FKDM, pemantauan isu strategis	kehadiran tidak stabil, tidak semua instansi membawa data	membuat agenda koordinasi tetap, format masukan wajib, daftar hadir wajib, evaluasi tindak lanjut hasil rapat	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 Bulan (Januari-Desember 2026)	-	-
22	Risiko Oprasional: Terlambatnya infomasi monitoring wilayah	ROO.26.05.206.22	Tim Monitoring Perangkat Daerah	Keterbatasan personil dengan cakupan wilayah yang cukup luas	Koordinasi dan bekerjasama dengan jajaran samping instansi vertikal seperti KODIM, POLRES, BIN, dan lainnya dalam monitoring wilayah	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 Bulan (Januari-Desember 2026)	-	-
23	Risiko Fraud : manipulasi data pelaporan hasil monitoring	ROO.26.05.206.23	Penggunaan format laporan monitoring yang baku. Laporan monitoring wajib diverifikasi oleh koordinator tim sebelum dikirim ke pimpinan. Rapat evaluasi bulanan untuk klarifikasi data yang meragukan. Koordinasi rutin dengan KODIM, POLRES, BIN untuk cross-check situasi wilayah.	Tidak ada sistem audit trail untuk pelacakan perubahan data. Laporan manual mudah dimodifikasi tanpa jejak. Verifikasi silang belum dilakukan secara berkala dan sistematis. Ketergantungan pada satu operator atau petugas tertentu	Mengimplementasikan sistem pelaporan digital dengan fitur identitas penginput dan catatan perubahan. Melakukan verifikasi silang rutin dengan KODIM, POLRES, BIN, dan perangkat kecamatan. Mewajibkan dua tingkat verifikasi (petugas + koordinator). Mengadakan pelatihan integritas dan anti-fraud bagi seluruh petugas monitoring. Membuat SOP baru tentang pencegahan manipulasi data pelaporan.	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 Bulan (Januari-Desember 2026)	-	-

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendalian
24	Risiko Oprasional: dokumen hasil rapat forkopimda tidak menggambarkan kondisi nyata sehingga keputusan pimpinan daerah kurang tepat	ROO.26.05.206.24	rapat rutin bulanan forkopimda	sulitnya koordinasi kehadiran semua pihak dalam satu waktu, laporan tidak baku, follow up lemah	menetapkan format baku laporan, jadwal pengumpulan bahan, rencana tindak lanjut	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 Bulan (Januari-Desember 2026)	-	-
25	Risiko Oprasional: Pelaporan hasil evaluasi kinerja Perangkat Daerah pada sistem informasi pelaporan tidak optimal	ROO.26.05.206.25	Melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.	Aplikasi sistem informasi pelaporan kinerja Perangkat Daerah belum optimal	Melakukan back up data pelaporan kinerja Perangkat Daerah untuk mengantisipasi kerusakan data pada aplikasi	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Maret, Juni, September, Desember 2026	-	-
26	Risiko Oprasional: Keterlambatan pengumpulan bahan untuk penyusunan dokumen perencanaan dari bidang-bidang	ROO.26.05.206.26	Melakukan koordinasi dengan masing-masing bidang dan Perangkat Daerah terkait.	Pembagian tugas di bidang yang kurang jelas dan kurangnya konsultasi ke Bappeda	Menetapkan jadwal resmi dan wajib dan update data perbulan	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Maret, Juni, September, Desember 2026	-	-
27	Resiko Fraud : Mark Up data realisasi kinerja	ROO.26.05.206.27	Melakukan rapat monitoring rencana aksi hasil kegiatan setiap triwulan dan koordinasi secara rutin	kehadiran belum secara menyeluruh	Melakukan punishment	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Maret, Juni, September, Desember 2026	-	-
28	Resiko kemitraan : ketidaksinkronan permintaan data klasifikasi dari pihak ketiga (BPS) dengan data di OPD	ROO.26.05.206.28	Melakukan koordinasi secara online	Ketidajelasan informasi	Meminta desk dengan BPS untuk menyamakan persepsi dan klasifikasi data	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Juni dan Desember 2026	-	-
29	Risiko Oprasional: Penyerapan anggaran tidak tepat waktu dan kurang maksimal	ROO.26.05.206.29	1). Melaksanakan monev serta koordinasi dengan PPTK terkait rencana kegiatan kedepan; 2). Melakukan proses perubahan/ pergeseran anggaran.	Kurangnya koordinasi dalam realisasi dan penyerapan anggaran antar bidang terkait	Optimalisasi penyusunan rencana anggaran kas dan jadwal rencana kegiatan.	Kasubbag Keuangan	Agustus 2026	-	-
30	Risiko Kemitraan: Keterlambatan pengiriman Rekom dari OPD Induk untuk pencairan TPP	ROO.26.05.206.30	Melaksanakan koordinasi dengan BPKAD	Permasalahan kondisional melihat kesiapan kondisi KAS Daerah	Memberikan pengertian kepada PNS Perangkat Daerah	Kasubbag Keuangan	Setiap Bulan 2026	-	-

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendalian
31	Risiko Fraud: Mencatat belanja yang tidak dilakukan agar anggarannya "terpakai"	ROO.26.05.206.31	1. Melakukan sosialisasi aturan kode etik dan SOP 2. Verifikasi berjenjang mengenai pertanggungjawaban anggaran dan pelaksanaan kegiatan	Kurangnya pengawasan	1. Penandatanganan pakta integritas 2. Mewajibkan adanya data dukung berupa foto yang terdapat keterangan lokasi dan waktu	Kasubbag Keuangan	Setiap Bulan 2026	-	-
32	Risiko Oprasional: laporan pertanggungjawaban atau dokumen pendukung tidak tepat waktu	ROO.26.05.206.32	Melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait	Belum adanya form baku sebagai penunjang pengumpulan SPJ	Optimalisasi penyeteroran SPJ dan jadwal kegiatan	Kasubbag Keuangan	Setiap Bulan 2026	-	-
33	Risiko Oprasional: Rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai	ROO.26.05.206.33	Penyusunan dan sosialisasi aturan kedisiplinan pegawai	Belum ada mekanisme sanksi dan reward yang terstruktur sehingga penerapan kedisiplinan tidak konsisten	Menyusun dan menerapkan mekanisme sanksi dan reward yang jelas, termasuk kategori pelanggaran, jenis sanksi, dan bentuk penghargaan bagi pegawai disiplin	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Februari 2026	-	-
34	Risiko Fraud: Pengadaan pakaian dinas yang tidak sesuai spesifikasi	ROO.26.05.206.34	Proses pengadaan diawasi untuk memastikan penyedia barang/jasa memenuhi kriteria yang ditetapkan sesuai spesifikasi	Pengawasan mutu yang lemah	Melakukan evaluasi penyusunan rencana kerja pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	April 2026	-	-
35	Risiko Kemitraan: Mitra tidak mampu memenuhi kebutuhan teknis unit kerja	ROO.26.05.206.35	1. Mengikuti diklat dan pelatihan dari BKPSDM 2. Mengikuti seminar zoom online yang berkaitan dengan tupoksi	Pegawai yang mengikuti belum menyeluruh	1. Melibatkan seluruh sub bidang dan pejabat pengelola Kepegawaian pada pertemuan koordinasi tertentu untuk mengusulkan kebutuhan diklat dan pelatihan kepada BKPSDM 2. Mengadakan pelatihan dan diklat mandiri untuk seluruh pegawai	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1. Maret 2026 2. November 2026	-	-
36	Risiko Operasional: Kualitas layanan administrasi umum masih belum optimal	ROO.26.05.206.36	Evaluasi pembagian tugas secara berkala sesuai jabatan masing-masing.	Masih ditemukan pegawai yang tidak menjalankan tugas sesuai dengan beban kerja yang seharusnya.	Pembinaan pegawai internal secara berkala.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Maret, Juni, September, Desember 2026	-	-
37	Risiko Operasional: Kualitas komponen yang tidak standar (berisiko menimbulkan bahaya)	ROO.26.05.206.37	Pengadaan cadangan komponen listrik	Masih ditemukan kesalahan awal, pemeliharaan yang tidak memadai	Menjaga cadangan komponen listrik	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Juni 2026	-	-
38	Risiko Operasional: Proses pengadaan yang lama	ROO.26.05.206.38	1. Melakukan perubahan Kas Budget saat PAK 2.	1. Membutuhkan waktu lama 2. Belum optimal	Menyusun laporan kondisi barang untuk memberikan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Juni 2026	-	-

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendalian
			Melakukan pengecekan fisik secara berkala untuk memastikan kelayakan fungsi dan keamanan peralatan		rekomendasi kepada pimpinan terkait keberlanjutan penggunaan alat lama				
39	Risiko Fraud: Pembuatan permintaan pembelian atau SPJ fiktif barang yang tidak pernah diterima atau digunakan oleh kantor	ROO.26.05.206.39	Proses pencocokan data dilakukan untuk memastikan konsistensi dan keaslian transaksi	Kelemahan dalam sistem pencatatan	Pencocokan data dukung berupa barang yang diterima beserta bukti fotonya	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	-	-
40	Risiko Fraud: Penyalahgunaan dalam proses penyediaan barang, seperti memanipulasi jumlah dan penggunaan barang untuk kepentingan pribadi	ROO.26.05.206.40	Pengawasan dilakukan oleh atasan secara langsung	Tidak ada perbandingan antara permintaan dan realisasi pemakaian barang	Melakukan audit pemakaian barang secara berkala, termasuk perbandingan permintaan dengan pemakaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	-	-
41	Risiko Kemitraan: Penyedia melakukan perubahan data rekening pembayaran tanpa konfirmasi	ROO.26.05.206.41	Pembayaran harus disetujui oleh PPK dan bendahara sebelum ditransfer ke rekening penyedia	Pegawai cenderung menerima informasi secara informal (WA, pesan pribadi, atau lisan)	Menerapkan verifikasi dua arah dan setiap informasi perubahan rekening harus disampaikan secara resmi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	-	-
42	Risiko Operasional: Dokumen perjalanan dinas tidak lengkap	ROO.26.05.206.42	Mempunyai arsip dan dokumentasi kelengkapan dokumen perjalanan dinas	Prosedur manual memungkinkan dokumen hilang atau tertunda	Memeriksa kelengkapan dokumen sebelum menyetujui pembayaran atau reimbursement	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	-	-
43	Risiko Operasional: Kebutuhan sarana dan prasarana kantor belum sepenuhnya terakomodir	ROO.26.05.206.43	Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kantor sesuai dengan prioritas kebutuhan.	Sarana dan prasarana kantor yang tersedia tidak sebanding dengan kebutuhan yang ada.	Memanfaatkan secara optimal sarana prasarana kantor yang tersedia serta ditunjang dengan kolaborasi dengan pihak terkait	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	-	-
44	Risiko Fraud: Merubah atau menurunkan spesifikasi teknis barang/jasa yang akan dibeli sementara nilai (harga) tidak berubah	ROO.26.05.206.44	Penandatanganan pakta integritas	Kurangnya monev	Melakukan verifikasi berjenjang	Sekretaris	Januari 2026	-	-
45	Risiko Operasional : Menetapkan barang yang tidak sesuai kebutuhan di DPA	ROO.26.05.206.45	Penyusunan kebutuhan Sarana dan Prasarana atas usulan yang ada	Kurangnya penganalisan yang dalam	Memeriksa persediaan barang berdasarkan kondisi barang yang rusak	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Juni 2026	-	-
46	Risiko Kemitraan :Penyedia memberikan	ROO.26.05.206.46	Proses pencocokan data dilakukan untuk	Kurangnya penganalisan yang	Melakukan retur barang sesuai dengan pesanan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	-	-

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi	Link Dokumen Pengendalian
	Barang yang tidak sesuai pesanan		memastikan barang sesuai dengan pesanan	dalam					
47	Risiko Operasional: Pelaksanaan layanan penunjang pemerintah daerah belum optimal	ROO.26.05.206.47	Perencanaan dan penganggaran Tahun 2026	Perubahan kebutuhan dan standar biaya	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Juni 2026	-	-
48	Risiko Operasional :Adanya Keterlambatan Pembayaran	ROO.26.05.206.48	Pembagian tugas berdasarkan tupoksi	komitmen individu	Komunikasi koordinasi internal	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Februari 2026	-	-
49	Risiko Fraud : Menciptakan kerusakan baru atau melebihi-lebihkan tingkat kerusakan agar biaya perbaikan meningkat	ROO.26.05.206.49	Melakukan pemeriksaan kerusakan oleh dua pihak independen (misalnya teknisi internal dan auditor teknis	Kemampuan teknisi internal kurang menguasai kerusakan	Menggunakan checklist standar agar penilaian kerusakan objektif	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	-	-
50	Risiko Kemitraan : Tenaga kebersihan kurang kompeten	ROO.26.05.206.50	Memilih vendor yang terbaik	Pilihan vendor terbatas	Melakukan komplain kepada vendor untuk mengganti dengan tenaga yang kompeten	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Juni 2026	-	-
51	Risiko Oprasional: Sarana dan prasarana penunjang kantor kurang terpelihara	ROO.26.05.206.51	Inventarisasi dan evaluasi terhadap sarana dan prasarana kantor secara berkala serta peningkatan pengawasan pemegang barang milik negara.	Tidak semua pegawai mempunyai kesadaran untuk memelihara sarana dan prasarana kantor dengan baik.	Pembinaan pegawai oleh atasan langsung terkait tugas dan tanggungjawabnya.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	-	-
52	Risiko Fraud: Penyedia jasa membuat tagihan lebih tinggi dari biaya sebenarnya atau menagih servis yang tidak pernah dilakukan	ROO.26.05.206.52	Dilakukan pemeriksaan fisik dan hasil pekerjaan sebelum pembayaran disetujui	Pemeriksaan hanya dilakukan dengan mengecek dokumen, belum memastikan validitas pekerjaan secara detail	Mewajibkan bukti laporan pekerjaan yang lengkap, detail, dan sesuai standar sebagai syarat pembayaran	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	-	-
53	Risiko Operasional: Penganggaran pemeliharaan tidak sesuai kebutuhan	ROO.26.05.206.53	Menjaga peralatan tetap berfungsi optimal dan memperpanjang masa pakainya	Ketiadaan jadwal pemeliharaan preventif yang tersruktur	Pemeliharaan preventif dan korektif dan penanggung jawab yang jelas	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	-	-
54	Risiko Kemitraan : Penyedia Tidak memiliki tenaga ahli yang memadai	ROO.26.05.206.54	Koordinasi ke pihak vendor atau penyedia	kurangnya pemantauan dari atasan langsung (mandor)	Meminta pertanggung jawaban ke pihak vendor atau penyedia	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Oktober 2026	-	-

BAB IV

RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Kesuksesan Pengendalian risiko strategis dan operasional OPD salah satunya dipengaruhi oleh faktor informasi dan komunikasi. Faktor informasi dan komunikasi diperlukan dalam penyampaian risiko strategis dan operasional serta rencana tindak pengendalian dalam menangani terjadinya risiko dalam urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik di Kabupaten Lamongan. Berikut akan dijabarkan mengenai rancangan informasi dan komunikasi yang telah disusun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan ke dalam matriks pada tabel 2.12 sebagai berikut:

Tabel 2. 12 Pengkomunikasian Pengendalian yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:								
1	Pembuatan buku saku penanganan konflik sosial Pembentukan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	Surat Keputusan pembentukan FKDM dan Rapat Koordinasi	Kebid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	Elemen masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh adat, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan	1 Bulan sekali (Januari-Desember)	-	=	-
2	Menjelaskan tema/ sub tema kegiatan, serta peserta dalam surat permintaan narasumber	Surat Permintaan Narasumber	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Narasumber Kegiatan	Triwulan III (September)	-	=	-
3	Program inklusif & fasilitas khusus	Surat Sosialisasi	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Masyarakat rentan (disabilitas dan lansia)	Desember 2029	-	=	-
4	Kampanye digital & konten kreatif	Sosialisasi digital	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Masyarakat luas terutama pemula	Desember 2029	-	=	-
5	Memperluas kampanye pendidikan pemilih melalui media sosial, komunitas, dan tokoh masyarakat	Surat Sosialisasi	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Komunitas dan Tokoh Masyarakat	Triwulan IV 2028	-	=	-
6	Petugas Pelayanan memberikan form SKM dengan segera setelah masyarakat mendapatkan pelayanan	Himbauan secara lisan	Petugas Pelayanan	Seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan	Setiap Hari	-	=	-
7	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Surat Rapat Koordinasi	Sekretariat Bakesbangpol	Seluruh Bidang Bakesbangpol	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September, Desember)	-	=	-
8	Melakukan back up data pelaporan manajemen resiko untuk mengantisipasi kerusakan data pada aplikasi	Dokumen hasil back up data pelaporan manajemen resiko	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Inspektorat	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September, Desember)	-	=	-
9	Melakukan review terhadap efektivitas pengendalian risiko secara berkala	Laporan Mitigasi Risiko	Sekretaris	Seluruh bidang terkait	Maret, Juni, September, Desember 2026	-	=	-
Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:								

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
1	Koordinasi	Rapat staf	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Pegawai terkait	Desember 2026	-	=	-
2	Koordinasi lintas OPD	Rapat koordinasi lintas OPD	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	OPD terkait	Juni 2026	-	=	-
3	Koordinasi dengan semua stakeholder	Panggilan langsung dan surat menyurat	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	OPD terkait	Juni 2026	-	=	-
4	Melibatkan PPI (Purna Paskibraka Indonesia) untuk mengampu Paskibraka	Rapat koordinasi	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	DPPI dan PPI	Juni 2026	-	=	-
5	Melibatkan Paskibraka atau Capaska untuk ikut dalam sosialisasi	Penyebaran informasi melalui grup Paskibraka atau Capaska	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Paskibraka atau Capaska	Juni 2026	-	=	-
6	Penandatanganan Pakta Integritas panitia seleksi Paskibraka	Rapat Koordinasi panitia Seleksi	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Panitia Seleksi Paskibraka	Maret 2026	-	=	-
7	Koordinasi	Rapat staf	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Pegawai terkait	Desember 2026	-	=	-
8	Konfirmasi ulang kehadiran narasumber paling lambat sehari sebelum pelaksanaan kegiatan	Konfirmasi kehadiran melalui panggilan atau pesan langsung	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Narasumber	September 2026	-	=	-
9	Konfirmasi ulang kepada penyedia	Panggilan langsung dan surat menyurat	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Penyedia	Oktober 2026	-	=	-
10	Koordinasi dengan pemerintah desa, kejaksaan dan opd terkait lainnya dalam pemantauan aliran kepercayaan	Surat Rapat Koordinasi	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Pemerintah desa, kejaksaan dan opd terkait lainnya	September 2026	-	=	-
11	Koordinasi dengan pemerintah desa, kejaksaan dan opd	Surat Rapat Koordinasi	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan	Pemerintah desa, kejaksaan dan opd terkait lainnya	September 2026	-	=	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
	terkait lainnya dalam pemantauan aliran kepercayaan		Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama					
12	Membuat telaah staf terkait penambahan dukungan anggaran sesuai dengan Kemendagri Nomor 000.10.3/e-844/polpum untuk disampaikan kepada Bappelitbangda	Rapat Koordinasi	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	Bupati, BPKAD dan Bappelitbangda	Mei 2026	-	=	-
13	Pembinaan untuk peningkatan pertanggungjawaban pengelolaan hibah parpol dengan bekerjasama dengan BPKP sebagai narasumber	1. Surat undangan Sosialisasi 2. Surat permintaan menjadi narasumber	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	1. Administrator Parpol 2. BPKP	September 2026	-	=	-
14	Pembinaan untuk peningkatan pertanggungjawaban laporan hasil monitoring	Rapat Koordinasi Internal	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	Seluruh Pegawai Bakesbangpol	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September, Desember)	-	=	-
15	Rapat Koordinasi TIMDU Pengawasan Ormas	Surat Rapat Koordinasi	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	TNI, POLRI, KEJAKSAAN, dan Instansi terkait lainnya (TIMDU pengawasan Ormas)	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September, Desember)	-	=	-
16	Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan digital kepada Ormas	Sosialisasi	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat	Ormas yang mau mendaftar	Setiap Bulan 2026	-	=	-
17	Melakukan pencatatan setiap perubahan draft disertai alasan tertulis	Koordinasi	Sekretaris	Seluruh pegawai Bakesbangpol	Maret 2026	-	=	-
18	Melakukan sistem reward dan punishment terhadap pegawai berprestasi ataupun pegawai yang menyimpang	Surat Sosialisasi	Sekretaris	Seluruh pegawai Bakesbangpol	Maret 2026	-	=	-
19	Menetapkan SOP pengumpulan dan verifikasi data wilayah. Menetapkan jadwal pembaruan data setiap bulan. Melakukan verifikasi silang dengan POLRES, KODIM, BIN, dan kecamatan. Membentuk tim supervisi data	Surat resmi, rapat koordinasi lintas sektor, email distribusi dokumen, grup WhatsApp monitoring wilayah, notulen rapat, paparan kebijakan teknis	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	POLRES, KODIM, BIN, FKDM, Camat, Kepala Desa, OPD teknis, perangkat monitoring wilayah	Maret, Juni, September, Desember 2026)	-	=	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
	untuk memastikan akurasi sebelum penyusunan kebijakan							
20	menyusun template data, menerapkan deadline wajib lapor, kalender koordinas, penanggung jawab dari tiap instansi	Surat permintaan data, lembar template input data, grup koordinasi, pendistribusian dokumen dalam bentuk soft file (PDF/Excel)	Bidang wasnas dan kerjasama intelijen	Polres, Kodim, BIN, FKDM, Kecamatan	Maret, Juni, September, Desember 2026	-	=	-
21	membuat agenda koordinasi tetap, format masukan wajib, daftar hadir wajib, evaluasi tindak lanjut hasil rapat	undangan rapat koordinasi, paparan rapat, Grup Wa Lintas instansi, penyampaian notulen rapat, forum FKDM, serta penyebaran informasi melalui email resmi perangkat daerah	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	TNI/Polri, BIN, Imigrasi, Disnaker, Disdukcapil, OPD teknis dan FKDM	12 Bulan (Januari-Desember 2026)	-	=	-
22	Koordinasi dan bekerjasama dengan jajaran samping instansi vertikal seperti KODIM, POLRES, BIN, dan lainnya dalam monitoring wilayah	Surat Rapat Koordinasi	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Instansi vertikal seperti KODIM, POLRES, BIN, dan lainnya dalam monitoring wilayah	12 Bulan (Januari-Desember 2026)	-	=	-
23	Mengimplementasikan sistem pelaporan digital dengan fitur identitas penginput dan catatan perubahan. Melakukan verifikasi silang rutin dengan KODIM, POLRES, BIN, dan perangkat kecamatan. Mewajibkan dua tingkat verifikasi (petugas + koordinator). Mengadakan pelatihan integritas dan anti-fraud bagi seluruh petugas monitoring. Membuat SOP baru tentang pencegahan manipulasi data pelaporan.	Surat tugas, surat edaran anti-fraud, rapat koordinasi, grup WhatsApp resmi monitoring wilayah, email distribusi laporan, penyampaian paparan dalam rapat bulanan	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	KODIM, POLRES, BIN, para Camat, Kepala Desa, FKDM, operator pelaporan	12 Bulan (Januari-Desember 2026)	-	=	-
24	menetapkan format baku laporan, jadwal pengumpulan bahan, rencana tindak lanjut	Rapat Koordinasi	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bupati, Kapolres, Dandim, Kajari, Ketua Pengadilan Negeri, DPRD, BIN, OPD teknis, dan pihak lain yang ditetapkan dalam SK Forkopimda	12 Bulan (Januari-Desember 2026)	-	=	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
25	Melakukan back up data pelaporan kinerja Perangkat Daerah untuk mengantisipasi kerusakan data pada aplikasi	Dokumen hasil back up data pelaporan kinerja	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Seluruh Bidang Bakesbangpol	Maret, Juni, September, Desember 2026	-	=	-
26	Menetapkan jadwal resmi dan wajib dan update data perbulan	Dokumen draft perencanaan	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Seluruh Bidang Bakesbangpol	Maret, Juni, September, Desember 2026	-	=	-
27	Melakukan punishment	Rapat Koordinasi	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Seluruh Staf Bakesbangpol	Maret, Juni, September, Desember 2026	-	=	-
28	Meminta desk dengan BPS untuk menyamakan persepsi dan klasifikasi data	Rapat koordinasi	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Seluruh Bidang Bakesbangpol	Juni dan Desember 2026	-	=	-
29	Optimalisasi penyusunan rencana anggaran kas dan jadwal rencana kegiatan.	Laporan hasil penyusunan rencana anggaran kas dan jadwal rencana kegiatan	Kasubbag Keuangan	Seluruh Bidang Bakesbangpol	Agustus 2026	-	=	-
30	Memberikan pengertian kepada PNS Perangkat Daerah	Jadwal rencana kegiatan	Kasubbag Keuangan	Seluruh Pegawai Bakesbangpol	Setiap Bulan 2026	-	=	-
31	1. Penandatanganan pakta integritas 2. Mewajibkan adanya data dukung berupa foto yang terdapat keterangan lokasi dan waktu	Laporan hasil Pertanggungjawaban	Kasubbag Keuangan	Seluruh Pegawai Bakesbangpol	Setiap Bulan 2026	-	=	-
32	Optimalisasi penyeteroran SPJ dan jadwal kegiatan	Form checklist pengumpulan SPJ	Kasubbag Keuangan	Seluruh Pegawai Bakesbangpol	Setiap Bulan 2026	-	=	-
33	Menyusun dan menerapkan mekanisme sanksi dan reward yang jelas, termasuk kategori pelanggaran, jenis sanksi, dan bentuk penghargaan bagi pegawai disiplin	Sosialisasi pegawai internal	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Seluruh Bidang Bakesbangpol	Februari 2026	-	=	-
34	Melakukan evaluasi penyusunan rencana kerja pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Sosialisasi pegawai internal	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Seluruh PPTK	April 2026	-	=	-
35	1. Melibatkan seluruh sub bidang dan pejabat pengelola Kepegawaian pada pertemuan koordinasi tertentu untuk mengusulakn kebutuhan diklat dan pelatihan kepada	Rapat koordinasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Seluruh Pegawai Bakesbangpol	Maret dan November 2026	-	=	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
	BKPSDM 2. Mengadakan pelatihan dan diklat mandiri untuk seluruh pegawai							
36	Pembinaan pegawai internal secara berkala.	Laporan hasil pembinaan pegawai internal	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Seluruh Bidang Bakesbangpol	Maret, Juni, September, Desember 2026	-	=	-
37	Menjaga cadangan komponen listrik	Laporan dan evaluasi berkala di area yang memerlukan perbaikan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Seluruh Bidang Bakesbangpol	Juni 2026	-	=	-
38	Menyusun laporan kondisi barang untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan terkait keberlanjutan penggunaan alat lama	Laporan fisik berkala	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Juni 2026	-	=	-
39	Pencocokan data dukung berupa barang yang diterima beserta bukti fotonya	Sosialisasi internal	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Seluruh PPTK	Setiap Bulan	-	=	-
40	Melakukan audit pemakaian barang secara berkala, termasuk perbandingan permintaan dengan pemakaian	Hasil audit dan laporan terkait penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Seluruh Bidang Bakesbangpol	Setiap Bulan	-	=	-
41	Menerapkan verifikasi dua arah dan setiap informasi perubahan rekening harus disampaikan secara resmi	SOP proses pembayaran dan verifikasi rekening	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Seluruh Bidang Bakesbangpol	Setiap Bulan	-	=	-
42	Memeriksa kelengkapan dokumen sebelum menyetujui pembayaran atau reimbursement	Monitoring pengumpulan dokumen	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Seluruh Bidang Bakesbangpol	Setiap Bulan	-	=	-
43	Memanfaatkan secara optimal sarana prasarana kantor yang tersedia serta ditunjang dengan kolaborasi dengan pihak terkait	Laporan inventarisasi kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Seluruh Bidang Bakesbangpol	Setiap Bulan	-	=	-
44	Melakukan verifikasi berjenjang	Sosialisasi	Sekretaris	Seluruh PPTK	Januari 2026	-	=	-
45	Memeriksa persediaan barang berdasarkan kondisi barang yang rusak	Rapat Koordinasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pengurus Barang	Juni 2026	-	=	-
46	Melakukan retur barang sesuai dengan pesanan	Koordinasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penyedia	Setiap Bulan	-	=	-
47	Penyesuaian anggaran dalam	Rapat Koordinasi	Kasubbag Umum dan	Kasubbag Perencanaan dan	Juni 2026	-	=	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
	anggaran perubahan		Kepegawaian	Evaluasi beserta kasubbag Keuangan				
48	Komunikasi koordinasi internal	Koordinasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Petugas yang bertanggungjawab	Februari 2026	-	=	-
49	Menggunakan checklist standar agar penilaian kerusakan objektif	Pembinaan pegawai internal	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Petugas teknis internal	Setiap Bulan	-	=	-
50	Melakukan komplain kepada vendor untuk mengganti dengan tenaga yang kompeten	Pemberitahuan lisan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Vendor penyedia jasa	Juni 2026	-	=	-
51	Pembinaan pegawai oleh atasan langsung terkait tugas dan tanggungjawabnya.	Penandatanganan pakta integritas; BAP serah terima barang milik daerah.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Seluruh Bidang Bakesbangpol	Januari 2026	-	=	-
52	Mewajibkan bukti laporan pekerjaan yang lengkap, detail, dan sesuai standar sebagai serta syarat pembayaran	Koordinasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penyedia Jasa	Setiap Bulan	-	=	-
53	Pemeliharaan preventif dan korektif dan penanggung jawab yang jelas	Koordinasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Seluruh pegawai Pengguna	Februari 2026	-	=	-
54	Meminta pertanggung jawaban ke pihak vendor atau penyedia	Koordinasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penyedia dan Mandor	Oktober 2026	-	=	-

BAB V

RANCANGAN PEMANTAUAN

Pengendalian dan pemantauan risiko merupakan salah satu faktor dalam penentuan keberhasilan sebuah organisasi dalam pelaksanaan tugas serta pencapaian target dan kinerja organisasi perangkat daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana tugas urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik guna menghadapi risiko-risiko yang diidentifikasi dalam pencapaian tujuan organisasi maka disusun sebuah rancangan pemantauan yang dapat kami kabarkan melalui matriks tabel 2.13 sebagaimana berikut :

Tabel 2. 13 Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
Risiko Strategis OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:							
1	Pembuatan buku saku penanganan konflik sosial Pembentukan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat)	Monev kegiatan rapat koordinasi, surat undangan dan kehadiran	Kepala Bakesbangpol	1 Bulan sekali (Januari-Desember)	-	=	-
2	Menjelaskan tema/ sub tema kegiatan, serta peserta dalam surat permintaan narasumber	Monev dan Surat Permintaan Narasumber	Kepala Bakesbangpol	Triwulan III (September)	-	=	-
3	Program inklusif & fasilitasi khusus	Monev kegiatan	Kepala Bakesbangpol	Desember 2029	-	=	-
4	Kampanye digital & konten kreatif	Monev kegiatan	Kepala Bakesbangpol	Desember 2029	-	=	-
5	Memperluas kampanye pendidikan pemilih melalui media sosial, komunitas, dan tokoh masyarakat	Monev kegiatan	Kepala Bakesbangpol	Desember 2029	-	=	-
6	Petugas Pelayanan memberikan form SKM dengan segera setelah masyarakat mendapatkan pelayanan	Monev Inputan data responden terbaru	Kepala Bakesbangpol	Semester 1 (Juni) dan Semester 2 (Oktober)	-	=	-
7	1) Pemaparan rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang 2) Pemaparan realisasi rencana kerja dan anggaran kegiatan masing-masing bidang.	Reviu hasil monev kinerja internal	Kepala Bakesbangpol	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September, Desember)	-	=	-
8	Melakukan back up data pelaporan manajemen resiko untuk mengantisipasi kerusakan data pada aplikasi	Evaluasi dokumen hasil back up data pelaporan manajemen resiko	Kepala Bakesbangpol	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September, Desember)	-	=	-
9	Melakukan review terhadap efektivitas pengendalian risiko secara berkala	Monitoring pengelolaan risiko	Kepala Bakesbangpol	Januari 2027, April, Juli, Oktober 2026	-	=	-
Risiko Operasional OPD Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik:							
1	Koordinasi	Monev dan pemantauan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Desember 2026	-	=	-
2	Koordinasi lintas OPD	Monev kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Juni 2026	-	=	-
3	Koordinasi dengan semua stakeholder	Monev kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Juni 2026	-	=	-
4	Melibatkan PPI (Purna Paskibraka Indonesia) untuk mengampu Paskibraka	Monev kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Juni 2026	-	=	-
5	Melibatkan Paskibraka atau Capaska untuk ikut dalam	Monev kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan	Juni 2026	-	=	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
	sosialisasi		Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama				
6	Penandatanganan Pakta Integritas panitia seleksi Paskibraka	Monev Daftar Penilaian Calon Anggota Paskibraka	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Juli 2026	-	=	-
7	Koordinasi	Monev dan pemantauan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	Desember 2026	-	=	-
8	Konfirmasi ulang kehadiran narasumber paling lambat sehari sebelum pelaksanaan kegiatan	Monev kegiatan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	September 2026	-	=	-
9	Konfirmasi ulang kepada penyedia	Monev dan pemantauan	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	November 2026	-	=	-
10	Koordinasi dengan pemerintah desa, kejaksaaan dan opd terkait lainnya dalam pemantauan aliran kepercayaan	Monev kegiatan, Surat Undangan dan Kehadiran	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	September 2026	-	=	-
11	Koordinasi dengan pemerintah desa, kejaksaaan dan opd terkait lainnya dalam pemantauan aliran kepercayaan	Monev kegiatan, Surat Undangan dan Kehadiran	Kabid Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama	September 2026	-	=	-
12	Membuat telaah staf terkait penambahan dukungan anggaran sesuai dengan Kemendagri Nomor 000.10.3/e-844/polpum untuk disampaikan kepada Bappelitbangda	Monev tindak lanjut telaah staf dukungan anggaran	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Juni 2026	-	=	-
13	Pembinaan untuk peningkatan pertanggungjawaban pengelolaan hibah parpol dengan bekerjasama dengan BPKP sebagai narasumber	Monev Kegiatan, Surat undangan dan permintaan, serta kehadiran	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	September 2026	-	=	-
14	Pembinaan untuk peningkatan pertanggungjawaban laporan hasil monitoring	Monev kegiatan, Surat Undangan dan Kehadiran	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September, Desember)	-	=	-
15	Rapat Koordinasi TIMDU Pengawasan Ormas	Monev kegiatan, Surat Undangan dan Kehadiran	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Triwulan I s/d IV (Maret, Juni, September, Desember)	-	=	-
16	Melakukan sosialisasi peningkatan kemampuan digital kepada Ormas	Monev kegiatan, Surat Undangan dan Kehadiran	Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	Setiap Bulan 2026	-	=	-
17	Melakukan pencatatan setiap perubahan draft disertai alasan tertulis	Monev kegiatan, Surat Undangan dan Kehadiran	Sekretaris	Maret 2026	-	=	-
18	Melakukan sistem reward dan punishman terhadap pegawai	Monev kegiatan, Surat	Sekretaris	Maret 2026	-	=	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
	berprestasi ataupun pegawai yang menyimpang	Undangan dan Kehadiran					
19	Menetapkan SOP pengumpulan dan verifikasi data wilayah. Menetapkan jadwal pembaruan data setiap bulan. Melakukan verifikasi silang dengan POLRES, KODIM, BIN, dan kecamatan. Membentuk tim supervisi data untuk memastikan akurasi sebelum penyusunan kebijakan	Monev Kegiatan	Kabid Kewaspadaan Nasional & Tim Pengawasan Internal Bakesbangpol	Maret, Juni, September, Desember 2026)	-	-	-
20	menyusun template data, menerapkan deadline wajib lapor, kalender koordinas, penanggung jawab dari tiap instansi	Review Dokumen	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan kerja sama intelijen	Maret, Juni, September, Desember 2026	-	-	-
21	membuat agenda koordinasi tetap, format masukan wajib, daftar hadir wajib, evaluasi tindak lanjut hasil rapat	Monev Kegiatan	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dan kerja sama intelijen	12 Bulan (Januari-Desember 2026)	-	-	-
22	Koordinasi dan bekerjasama dengan jajaran samping instansi vertikal seperti KODIM, POLRES, BIN, dan lainnya dalam monitoring wilayah	Monev kegiatan, Surat Undangan dan Kehadiran	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1 Bulan sekali (Januari-Desember)	-	-	-
23	Mengimplementasikan sistem pelaporan digital dengan fitur identitas penginput dan catatan perubahan. Melakukan verifikasi silang rutin dengan KODIM, POLRES, BIN, dan perangkat kecamatan. Mewajibkan dua tingkat verifikasi (petugas + koordinator). Mengadakan pelatihan integritas dan anti-fraud bagi seluruh petugas monitoring. Membuat SOP baru tentang pencegahan manipulasi data pelaporan.	Monev kegiatan	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 Bulan (Januari-Desember 2026)	-	-	-
24	menetapkan format baku laporan, jadwal pengumpulan bahan, rencana tindak lanjut	Review kelengkapan dokumen Forkopimda	Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	12 Bulan (Januari-Desember 2026)	-	-	-
25	Melakukan back up data pelaporan kinerja Perangkat Daerah untuk mengantisipasi kerusakan data pada aplikasi	Evaluasi dokumen hasil back up data pelaporan kinerja	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Maret, Juni, September, Desember 2026	-	-	-
26	Menetapkan jadwal resmi dan wajib dan update data perbulan	Reviu dokumen perencanaan	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Maret, Juni, September, Desember 2026	-	-	-
27	Melakukan punishment	Dokumen rencana aksi kegiatan dan evaluasi capaian kinerja	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Maret, Juni, September, Desember 2026	-	-	-
28	Meminta desk dengan BPS untuk menyamakan persepsi dan klasifikasi data	Monev hasil desk dan kehadiran	Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi	Juni dan Desember 2026	-	-	-
29	Optimalisasi penyusunan rencana anggaran kas dan jadwal rencana kegiatan.	Monev hasil penyusunan rencana anggaran kas dan jadwal rencana kegiatan	Kasubbag Keuangan	Agustus 2026	-	-	-
30	Memberikan pengertian kepada PNS Perangkat Daerah	Hasil Koordinasi	Kasubbag Keuangan	Setiap Bulan 2026	-	-	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
31	1. Penandatanganan pakta integritas 2. Mewajibkan adanya data dukung berupa foto yang terdapat keterangan lokasi dan waktu	Monev hasil laporan pertanggungjawaban	Kasubbag Keuangan	Setiap Bulan 2026	-	=	-
32	Optimalisasi penyeteroran SPJ dan jadwal kegiatan	Monev hasil laporan pertanggungjawaban	Kasubbag Keuangan	Setiap Bulan 2026	-	=	-
33	Menyusun dan menerapkan mekanisme sanksi dan reward yang jelas, termasuk kategori pelanggaran, jenis sanksi, dan bentuk penghargaan bagi pegawai disiplin	Rapat sosialisasi internal Bakesbangpol	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Februari 2026	-	=	-
34	Melakukan evaluasi penyusunan rencana kerja pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Monitoring oleh PPK	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	April 2026	-	=	-
35	1. Melibatkan seluruh sub bidang dan pejabat pengelola Kepegawaian pada pertemuan koordinasi tertentu untuk mengusulakn kebutuhan diklat dan pelatihan kepada BKPSDM 2. Mengadakan pelatihan dan diklat mandiri untuk seluruh pegawai	Usulan diklat dan monev kegiatan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Maret dan November 2026	-	=	-
36	Pembinaan pegawai internal secara berkala.	Evaluasi hasil pembinaan pegawai internal Bakesbangpol	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Maret, Juni, September, Desember 2026	-	=	-
37	Menjaga cadangan komponen listrik	Evaluasi setelah proyek atau kegiatan selesai	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Juni 2026	-	=	-
38	Menyusun laporan kondisi barang untuk memberikan rekomendasi kepada pimpinan terkait keberlanjutan penggunaan alat lama	Evaluasi kebutuhan secara periode	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Juni 2026	-	=	-
39	Pencocokan data dukung berupa barang yang diterima beserta bukti fotonya	Monev kegiatan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	-	=	-
40	Melakukan audit pemakaian barang secara berkala, termasuk perbandingan permintaan dengan pemakaian	Monitoring dan evaluasi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	-	=	-
41	Menerapkan verifikasi dua arah dan setiap informasi perubahan rekening harus disampaikan secara resmi	Laporan terkait jumlah pembayaran yang telah diverifikasi dan temuan ketidaksesuaian	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	-	=	-
42	Memeriksa kelengkapan dokumen sebelum menyetujui pembayaran atau reimbursement	Laporan monitoring rutin	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	-	=	-
43	Memanfaatkan secara optimal sarana prasarana kantor yang tersedia serta ditunjang dengan kolaborasi dengan pihak terkait	Monev kebutuhan sarana dan prasarana kantor	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	-	=	-
44	Melakukan verifikasi berjenjang	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Sekretaris	Januari 2026	-	=	-
45	Memeriksa persediaan barang berdasarkan kondisi barang yang rusak	Hasil daftar kondisi persediaan barang	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Juni 2026	-	=	-

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Link Dokumen	Keterangan
		yang ada					
46	Melakukan retur barang sesuai dengan pesanan	Kesesuaian Hasil retur	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	-	=	-
47	Penyesuaian anggaran dalam anggaran perubahan	Rapat koordinasi internal	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Juni 2026	-	=	-
48	Komunikasi koordinasi internal	Monev bukti pembayaran	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Februari 2026	-	=	-
49	Menggunakan checklist standar agar penilaian kerusakan objektif	Pembinaan pegawai internal	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	-	=	-
50	Melakukan komplain kepada vendor untuk mengganti dengan tenaga yang kompeten	Tindak lanjut pergantian tenaga kebersihan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Juni 2026	-	=	-
51	Pembinaan pegawai oleh atasan langsung terkait tugas dan tanggungjawabnya.	Monev barang milik daerah	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Januari 2026	-	=	-
52	Mewajibkan bukti laporan pekerjaan yang lengkap, detail, dan sesuai standar sebagai serta syarat pembayaran	Monev bukti laporan pendukung	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Setiap Bulan	-	=	-
53	Pemeliharaan preventif dan korektif dan penanggung jawab yang jelas	Menetapkan jadwal perawatan berkala	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Februari 2026	-	=	-
54	Meminta pertanggung jawaban ke pihak vendor atau penyedia	Evaluasi terhadap hasil pekerjaan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Oktober 2026	-	=	-

BAB VI PENUTUP

Dari hasil yang telah dijabarkan di atas bahwa dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan telah menyusun dokumen penilaian risiko sesuai dengan kaidah dan semoga dokumen penilaian risiko tahun 2026 ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya sebagai panduan dalam penanganan dan identifikasi risiko dalam pencapaian tujuan dan sasaran OPD dalam tugas urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, Politik di Kabupaten Lamongan.

Plt. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN LAMONGAN


JONO NUSIYANTO, S.H., M.H.
Penyelia Tingkat I
NIP. 19680114 198801 1 001